



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR^o TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Sistem Akuntansi Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-82/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA.

Pasal 1...

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Sistem Akuntasi Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, yang selanjutnya disebut Pedoman Akuntansi Pusfatekgan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Sistematika Pedoman Akuntansi Pusfatekgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab II Siklus dan Prosedur Akuntansi

Bab III Laporan Keuangan

Bab IV Neraca

Bab V Laporan Aktivitas

Bab VI Laporan Arus Kas

Bab VII Catatan atas Laporan Keuangan

Bab VIII Sistem Akuntansi Aset

Bab IX Akuntansi Biaya

Bab X Indikator Kinerja Keuangan

Pasal 3

- (1) Pedoman Akuntansi Pusfatekgan ini berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan dan disusun oleh Satuan Kerja Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan).
- (2) Disamping pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Pusfatekgan juga berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pasal 4...

Pasal 4

Pengintegrasian laporan keuangan Satuan Kerja Pusfatekgan dengan laporan keuangan lembaga dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Pasal 5

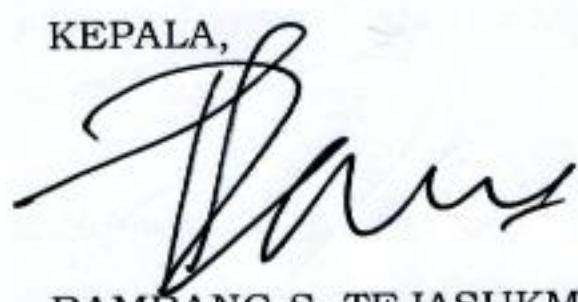
Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Pasal 6

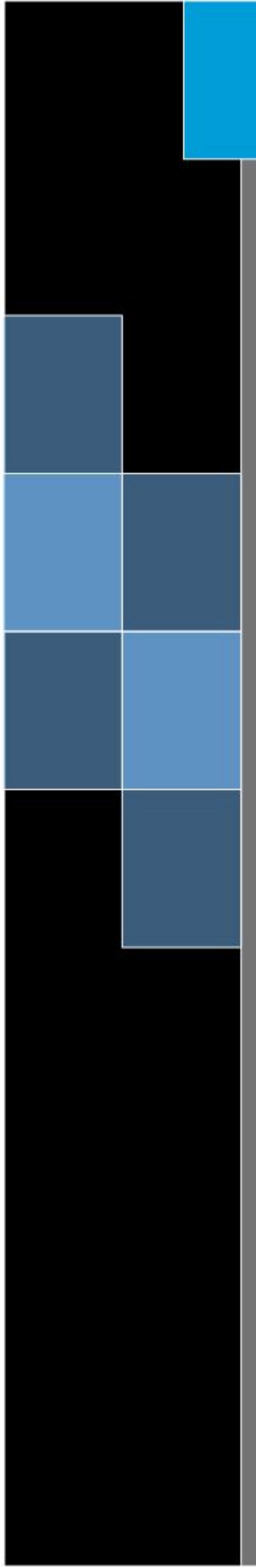
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **02 OCT 2012**

KEPALA,



BAMBANG S. TEJASUKMANA



PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI

PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL



PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda reformasi dalam bidang keuangan negara adalah adanya pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, melainkan pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang semakin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang semakin tinggi. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dengan mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) yaitu paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dalam UU Perbendaharaan Negara, pasal 68 dan pasal 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Dari sisi internal LAPAN, kebijakan tersebut memberi peluang untuk mengoptimalkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat atas hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang kedirgantaraan yang telah dilakukan dan mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga pada tahun 2008, LAPAN membentuk unit kerja baru setingkat Eselon II

yaitu Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan pengembangan pemanfaatan teknologi dirgantara serta pengembangan masyarakat pengguna.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008 tentang Penetapan Pusfatekgan pada LAPAN sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), ditetapkan bahwa Pusfatekgan merupakan Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Secara Penuh (BLU Penuh). Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut, juga diamanatkan bahwa Pusfatekgan wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (tahun) setelah penetapan menjadi BLU.

Satuan Kerja (Satker) Pusfatekgan mempunyai keunikan tersendiri yang membedakan dengan satker lainnya di lingkungan LAPAN. Salah satu perbedaannya adalah dalam sistem akuntansi. Pusfatekgan menyelenggarakan akuntansi sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia. Meskipun demikian, Pusfatekgan tetap merupakan satker pemerintah. Laporan keuangan Pusfatekgan harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan lembaga dan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu disusun Pedoman Akuntansi sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntansi Satker PK-BLU di LAPAN, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada penyajian laporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

B. Karakteristik Pusfatekgan

Pusfatekgan merupakan Satker PK-BLU yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat di bidang kedirgantaraan. Produk layanan yang dihasilkan oleh Pusfatekgan berupa:

Tabel 1. Produk....

No.	Layanan	Sub Layanan
1	Data Penginderaan Jauh	<ul style="list-style-type: none">- Data Penginderaan JauhALOS- Data Penginderaan Jauh Quickbird/Worldview- Data Penginderaan Jauh SPOT 4
2.	Informasi Berbasis Citra Penginderaan Jauh	<ul style="list-style-type: none">- Umum- Instansi Pemerintah
3.	Pencetakan Informasi Citra Penginderaan Jauh	<ul style="list-style-type: none">- Ukuran 60"- Ukuran A0- Ukuran A1
4.	Bimtek Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis	<ul style="list-style-type: none">- Bimtek Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar- Bimtek Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut
5.	Produk Rekayasa Industri Teknologi Dirgantara	<ul style="list-style-type: none">- Sistem Hibrid Kincir Angin dan Panel Surya- Instrumen kedirgantaraan- Motor Roket

Tabel 1. Produk Layanan

Dalam kegiatan operasionalnya, Pusfatekgan dapat melayani masyarakat dengan menyelenggarakan layanan di bidang penginderaan jauh dan teknologi dirgantara terapan berupa:

1. Penginderaan Jauh

Adalah ilmu dan teknologi yang dapat digunakan untuk mengenal, mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, mengekstraksi karakteristik obyek tanpa menyentuh langsung. Komponen penginderaan jauh terdiri atas gelombang elektromagnetik, atmosfer, permukaan bumi, satelit, sensor, *ground station*, pengolahan citra digital, dan aplikasi penginderaan jauh.

Produk layanan yang dihasilkan oleh penginderaan jauh adalah:

a) Produk...

a) Produk Data Penginderaan Jauh

Adalah data penginderaan jauh yang dicirikan memiliki posisi lokasi yaitu yang tersimpan dalam suatu entitas koordinat geografi, datum, proyeksi dan topologi. Produknya dalam bentuk *softcopy*.

b) Produk Informasi Berbasis Citra Penginderaan Jauh

Adalah hasil pengolahan data penginderaan jauh yang informasi atributnya *dimanage* dan diasosiasi melalui skema bergeoreferensi atau suatu entitas koordinat geografi, datum, proyeksi dan topologi.

Hasil pengolahan data penginderaan jauh yang sudah dipisahkan menjadi sejumlah layer/tapis, dimana antar layer bergeoreferensi dan relasional. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemodelan dan menginterpretasi hasil model terhadap produk database spasial, digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian dan kapabilitas serta untuk estimasi dan prediksi. Metode analisis spasial adalah *topological overlay*, *raster analysis* dan lain-lain. Produknya adalah dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy*, dan laporan.

c) Bimtek Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis

Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) adalah memberikan bimbingan atau berbagi ilmu dengan cara praktik dan pemaparan mengenai pemanfaatan dan teknologi penginderaan jauh oleh para ahli dalam bidang penginderaan jauh, disertai juga peninjauan serta survei lapangan lokasi kegiatan. Kegiatan Bimtek ditujukan agar SDM di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah terkait dapat menjalankan pembinaan, pengawasan konservasi, serta pemetaan sumber daya alam sesuai dengan kewenangannya secara tepat dan benar, sejalan dengan kebijakan maKo yang digariskan oleh pemerintah.

2. Teknologi Dirgantara

Adalah teknologi yang berorientasi pada pemanfaatan untuk eksplorasi kedirgantaraan seperti roket dan satelit. Sedangkan teknologi dirgantara terapan yaitu hasil *spin-off* dari teknologi

dirgantara yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Produk layanan yang dihasilkan pada bidang teknologi dirgantara adalah:

a) Sistem Hibrid Kincir Angin dan Panel Surya

Adalah sistem konversi energi angin untuk menghasilkan energi proses pengubahan energi angin menjadi putaran mekanis rotor dan selanjutnya menjadi energi listrik. Sistem konversi energi angin ini merupakan suatu sistem/peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik, mekanis, atau bentuk energi lainnya.

b) Instrumen Kedirgantaraan

Adalah peralatan atau instrumen yang berorientasi pada aplikasi kedirgantaraan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Produk Instrumen Kedirgantaraan diantaranya berupa peralatan *Automatic Weather System (AWS)* dan *Tide Gauge*.

c) Motor Roket

Adalah perangkat pendorong roket yang menggunakan propelan untuk menghasilkan propulsi jet kecepatan tinggi. Prinsip kerja motor roket merupakan suatu reaksi yang didasarkan pada hukum ketiga Newton. Motor roket adalah massa yang disimpan, dimana massa tersebut dihasilkan oleh tekanan dan temperatur yang tinggi pada propelan padat atau cair yang diakibatkan oleh pengapian. Solid Propelan adalah bahan bakar roket berbentuk padat, yang terbentuk dari komposisi bahan fuel-binder, oxidizer, dan bahan lain. Solid propelan yang akan dibuat sebagai motor roket didasarkan pada: besarnya roket, berat, kecepatan, dan tinggi/jangkauan terbang.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan yang dihasilkan oleh Pusfatekgan dapat terus berkembang, serta masih terbukanya pangsa pasar dari pemanfaatan teknologi dirgantara terapan saat ini. Selain itu hal ini dimungkinkan dari terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Pusfatekgan melalui pengembangan dan

rekayasa yang dilakukan oleh Pusfatekgan sendiri ataupun melalui kerjasama dengan LAPAN dan pihak-pihak lainnya. Sampai saat ini para pengguna (*users*) dari jasa layanan yang diberikan oleh Pusfatekgan mencakup berbagai lapisan dan kalangan pengguna yang terdiri dari instansi pemerintah pusat lainnya, antara lain: dari TNI/Polri; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dll; Pemerintah Daerah; BUMN/D; swasta, dan masyarakat.

Jumlah dan jenis *user* dari jasa layanan yang dihasilkan oleh Pusfatekgan juga semakin meluas dan bertambah antara lain berasal dari luar negeri dan lapisan masyarakat lainnya mengingat saat ini sedang dibahas mengenai kerjasama dengan pihak lain serta kemungkinan kerjasama dari pihak luar negeri, antara lain India, Rusia, dan beberapa negara lainnya terkait pemanfaatan kantor perwakilan Biak sebagai salah satu pusat pelayanan dirgantara berkapasitas internasional.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan :

Tujuan penyusunan Pedoman Akuntansi ini adalah sebagai acuan Pusfatekgan sebagai Satker PK-BLU dalam penyelenggaraan sistem akuntansi, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada penyajian laporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

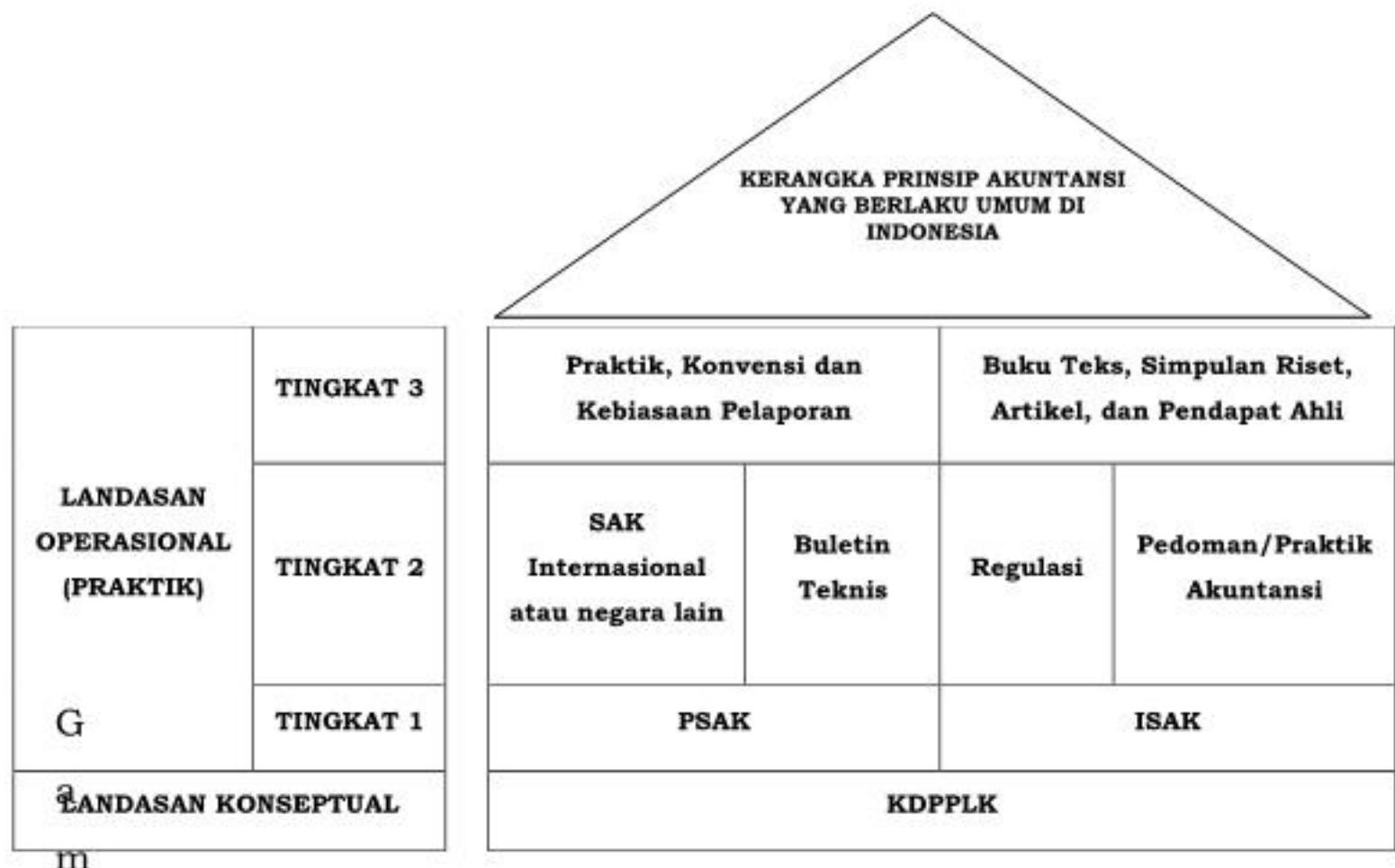
Ruang Lingkup:

Pedoman ini menjelaskan gambaran umum, jenis dan ilustrasi format laporan keuangan, akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas.

D. Bangun Prinsip Akuntansi Berlaku Umum

1. Proses perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bangun prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka...



Gambar 1. Kerangka Prinsip Akuntansi

2. Kerangka ini digambarkan seperti suatu bangunan rumah “Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia”. Setiap lapisan di bawah menjadi landasan bagi lapisan yang berada di atasnya. Dalam hal terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dari berbagai sumber dalam landasan operasional, maka harus mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur di dalam kelompok yang posisinya menjadi landasan atau pada lapisan yang terletak lebih di bawah.

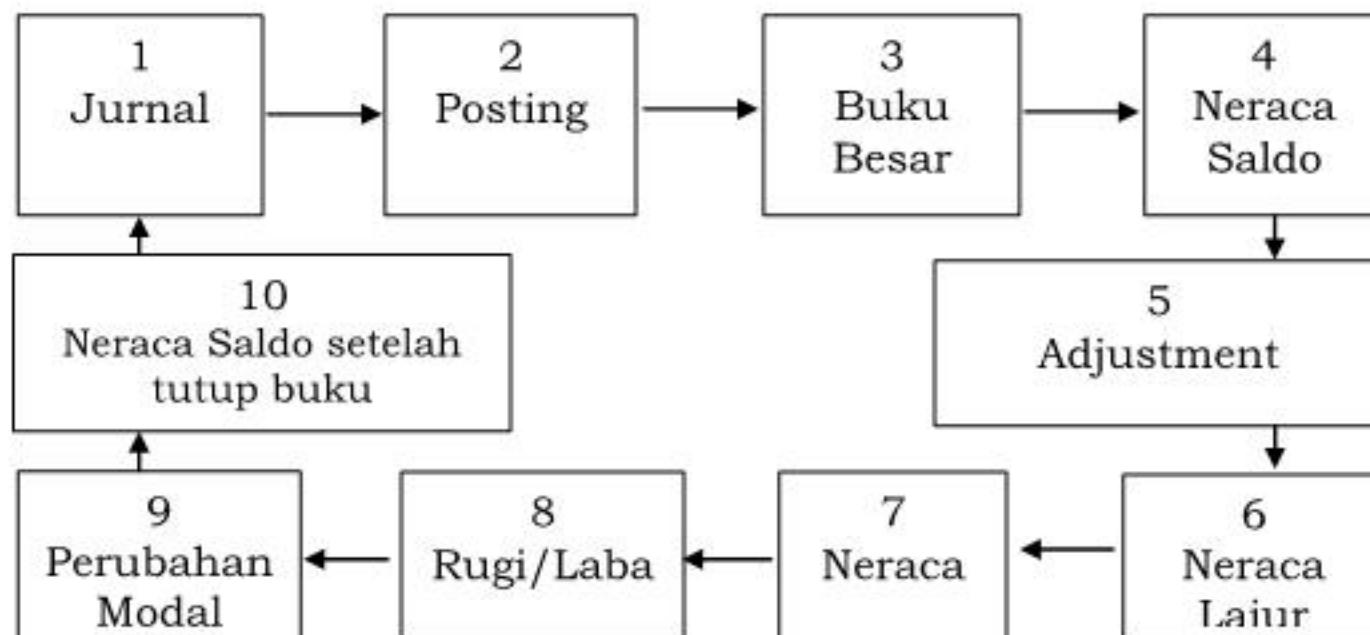
BAB II

SIKLUS DAN PROSEDUR AKUNTANSI

1. Siklus Akuntansi

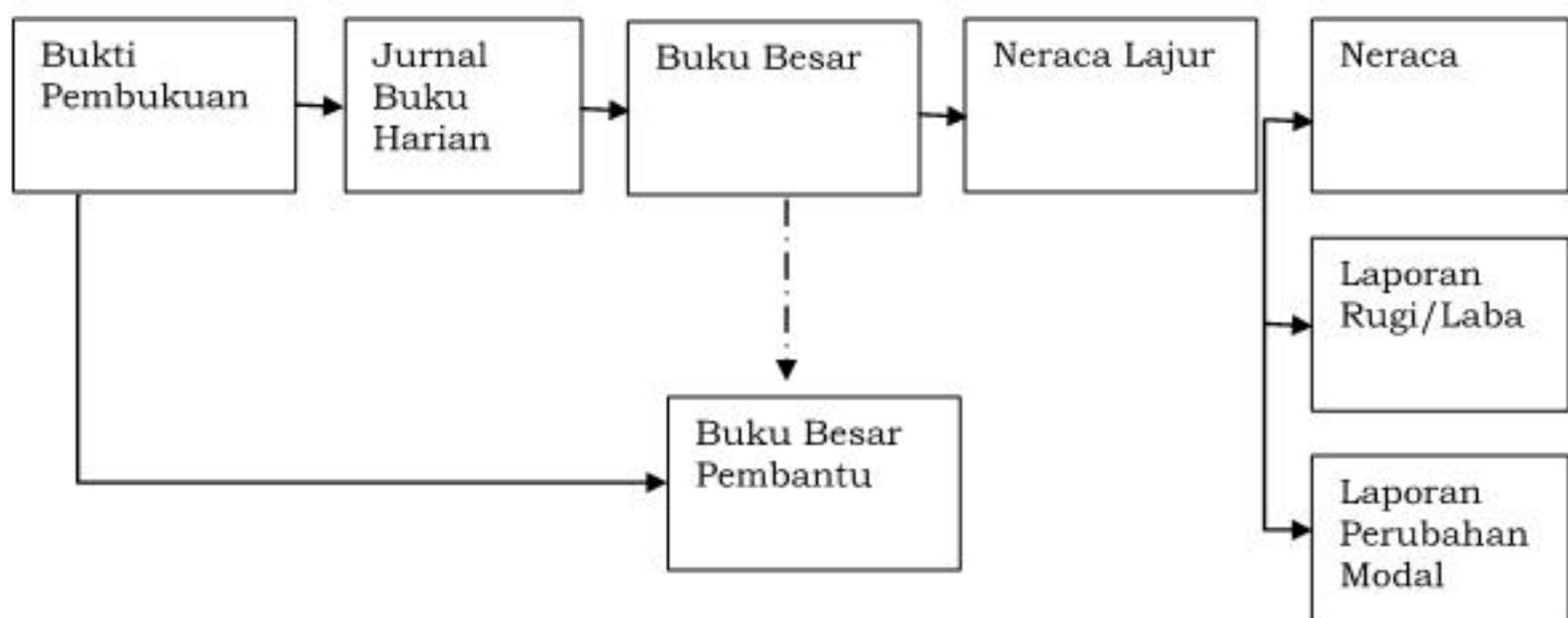
Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan, penggolongan sampai dengan pelaporan dalam bentuk Laporan Keuangan. Siklus akuntansi digambarkan dalam bagan alur di bawah ini:

Bagan 2.1. Siklus...



Bagan 1. Siklus Akuntansi

Laporan Keuangan adalah merupakan hasil kegiatan proses akuntansi dan proses itu sendiri dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2. Pembentukan Laporan Keuangan

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur Pencatatan terdiri dari:

- Bukti asli (*original document*) sebagai bukti terjadinya suatu transaksi;
- Alat untuk mengklasifikasikan serta mencatat transaksi yang biasa disebut Jurnal/Buku Harian (*books or original entry journal*);
- Alat-alat untuk mengikhtisarkan akibat perubahan yang terjadi pada pos/rekening Aktiva, Hutang dan Modal yang disebut dengan Buku Besar.

Tahap-tahap pekerjaan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan:

- Pembuatan...

a. Pembuatan bukti pembukuan

Bukti pembukuan harus dibuat dalam suatu transaksi keuangan karena dengan adanya bukti pembukuan:

- 1) Transaksi keuangan yang terjadi telah mendapatkan pengesahan/persetujuan.
 - 2) Alat untuk mengidentifikasi keuangan yang terjadi.
 - 3) Ada perintah untuk membukukan transaksi yang terjadi.
- b. Pengolongan dan pencatatan bukti pembukuan bukti ke dalam jurnal (buku harian).
- c. Pencatatan ke dalam Buku Besar (*posting*) dan memasukkan catatan yang terperinci dari bukti asli ke dalam Buku Besar Pembantu.
- d. Pembuatan Neraca Lajur.
- e. Penyajian Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Perubahan Modal.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN

A. KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN PUSFATEKGAN

1. Tujuan laporan keuangan

- a) Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
 - 1) Pemberi bantuan (donator);
 - 2) Investor;
 - 3) Keditur;
 - 4) Otoritas pengawasan;
 - 5) Pemerintah ; dan
 - 6) Masyarakat.
- b) Pihak pengguna laporan keuangan Pusfatekgan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:

1) Jasa...

- 1) Jasa yang diberikan oleh Pusfatekgan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; dan
 - 2) Cara manajemen Pusfatekgan melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.
- c) Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, meliputi informasi mengenai:
- 1) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan aset bersih Pusfatekgan;
 - 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset bersih;
 - 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
 - 4) Cara Pusfatekgan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; dan
 - 5) Usaha jasa Pusfatekgan.
- d) Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Komponen Laporan Keuangan

- a) Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:
- 1) Neraca;
 - 2) Laporan Aktivitas;
 - 3) Laporan Arus Kas; dan
 - 4) Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b) Neraca
- 1) Tujuan Neraca adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan Pusfatekgan meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu
 - 2) Informasi dalam Neraca yang digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya, sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan Pusfatekgan untuk menilai:

(a) Kemampuan...

- (a) Kemampuan Pusfatekgan dalam memberikan jasa pelayanan kedirgantaraan secara bekesinambungan;
 - (b) Likuiditas dan solvabilitas; dan
 - (c) Kebutuhan pendanaan eksternal.
- c) Laporan Aktivitas
- 1) Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:
 - (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat ekuitas;
 - (b) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
 - (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
 - 2) Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
 - (a) Mengevaluasi kinerja Pusfatekgan dalam suatu periode;
 - (b) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa;
 - (c) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen Pusfatekgan; dan
 - (d) Menilai rentabilitas.
 - 3) Laporan aktivitas mencakup struktur anggaran Pusfatekgan secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah ekuitas selama suatu periode. Perubahan ekuitas dalam laporan aktivitas selanjutnya tercermin pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
- d) Laporan Arus Kas
- 1) Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2) Informasi...

- 2) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai;
 - (a) kemampuan Pusfatekgan dalam menghasilkan kas dan setara kas;
 - (b) sumber dana Pusfatekgan;
 - (c) penggunaan dana Pusfatekgan; dan
 - (d) kemampuan Pusfatekgan untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.
 - (e) Catatan Atas Laporan Keuangan
 - (1) Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas Laporan Keuangan Pusfatekgan.
 - (2) Informasi dalam catatan atas laporan keuangan mencakup antara lain:
 - (a) Pendahuluan;
 - (b) Kebijakan akuntansi;
 - (c) Penjelasan atas pos-pos neraca;
 - (d) Penjelasan atas pos-pos laporan aktivitas;
 - (e) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
 - (f) Kewajiban kontijensi; dan
 - (g) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Laporan keuangan pokok di atas disertai dengan Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan, yang terdiri dari: Imbalan Investasi (*Return on Investment*), Rasio Kas (*Cash Ratio*), Rasio Lancar (*Current Ratio*), *Collection Period*, Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*), Perputaran Total Aset, dan Rasio Total Aset Bersih terhadap Total Aset.

3. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Manajemen Pusfatekgan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4. Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

5. Mata uang pelaporan

- a) Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- b) Jika transaksi menggunakan mata uang lain selain dari rupiah maka laporan tersebut harus dikonversikan dalam mata uang rupiah.
- c) Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- d) Aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan disesuaikan nilainya dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.
- e) Kurs yang digunakan adalah kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- f) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing diakui dalam pelaporan aktivitas pada saat tanggal transaksi. Sedangkan keuntungan atau kerugian dari penyesuaian saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan aktivitas pada saat tanggal penyesuaian nilai (tanggal pelaporan).

6. Kebijakan akuntansi

- a) Kebijakan akuntansi tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan

sesuai...

sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

- b) Jika PSAK yang ada belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.
- c) Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, manajemen memperhatikan:
 - 1) Persyaratan dan pedoman SAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
 - 2) Definisi, Kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); dan
 - 3) Penyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1) dan 2) di atas.

7. Penyajian

- a) Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (Aktivitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- c) Laporan aktivitas dikelompokkan secara *single step*.
- d) Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
- e) Dalam...

e) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

f) Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi;

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

2) Perubahan kebijakan akuntansi

(a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

(1) terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
(2) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

(b) Penerapan standar akuntansi yang berbeda yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi mengikuti ketentuan transisi dalam standar akuntansi tersebut. Apabila tidak diatur ketentuan transisinya, maka penerapan perubahan kebijakan akuntansi ditetapkan secara *retrospektif*.

(c) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelum periode sajian menyesuaikan saldo surplus/defisit awal periode sajian.

(d) Dalam...

- (d) Dalam hal perlakuan secara *retrospektif* dianggap tidak praktis (khususnya perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat wajib) untuk periode-periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif pada periode hal tersebut menjadi praktis.
- 3) Terdapat kesalahan mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan pada periode terjadinya kesalahan. Jika periode tersebut adalah sebelum periode sajian, maka koreksi kesalahan mendasar akan menyesuaikan saldo surplus/defisit saldo awal periode sajian.

- g) Pada setiap lembar Neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa "*catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan*".

8. Konsistensi penyajian

- a) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:
- 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Pusfatekgan; atau
 - 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- b) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

9. Materialitas dan agregasi

- a) Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas;
- b) Pos-pos...

- b) Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis;
- c) Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

10. Saling hapus (*Offsetting*)

- a) Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau Aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban; dan
- b) Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai.

11. Periode pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal Pusfatekgan baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, Pusfatekgan dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b) Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

12. Informasi komparatif

- a) Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (misalnya neraca Juni 2XX1 dibandingkan dengan neraca per 30

Juni 2XX0). Sedangkan untuk laporan pendapatan dan beban interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.

- b) Informasi komparatif yang bersifat *narratif* dan *deskriptif* dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

13. Laporan keuangan interim

- a) Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau periode lain yang kurang dari satu tahun.
- b) Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari: neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- c) Penyajian laporan keuangan interim komparasi adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan	Periode Interim	Periode Komparatif
Neraca Per	30 Juni 20X1	31 Desember 20X0
Laporan aktivitas Untuk Periode 6 bulan	1 Jan s.d. 30 Juni 20X1	1 Jan s.d. 30 Juni 20X0
Laporan Arus Kas Untuk periode 6 bulan	1 Jan s.d. 30 Juni 20X1	1 Jan s.d. 30 Juni 20X0

Tabel 2. Penyajian Laporan Keuangan Interim

B. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat Historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
2. Bersifat Umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Hanya melaporkan informasi yang material;
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan Ekuitas atau nilai Aset yang paling kecil;
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas); dan
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar BLU.

BAB IV

N E R A C A

A. AKUNTANSI ASET

1. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK

- a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pusfatekgan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana...

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pusfatekgan serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b) Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada Pusfatekgan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional Pusfatekgan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.
- c) Pusfatekgan biasanya menggunakan aset untuk memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pihak-pihak yang berkepentingan maka pihak-pihak tersebut bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas Pusfatekgan. Kas sendiri memberikan jasa kepada Pusfatekgan karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.
- d) Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pusfatekgan dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:
 - 1) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dijual oleh Pusfatekgan;
 - 2) dipertukarkan dengan aset lain; atau.
 - 3) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban.
- e) Pada umumnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset kalau aset tersebut mendatangkan manfaat ekonomi kepada Pusfatekgan di masa depan dan dikuasai oleh Pusfatekgan.

f) Pada...

- f) Pada umumnya aset, misalnya piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam konteks akuntansi penentuan eksistensi aset, hak milik tidak esensial, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha pembiayaan (*financial lease*), jika Pusfatekgan mengendalikan manfaat yang diharapkan dari property tersebut maka properti tersebut dapat diakui menjadi aset. Meskipun kemampuan Pusfatekgan untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, Pusfatekgan menikmati manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.
- g) Aset Pusfatekgan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi dimasa lalu. Pusfatekgan biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset. Misalnya, properti yang diterima Pusfatekgan dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- h) Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aset, misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset.
- i) Syarat pengakuan aset adalah:
 - 1) Pos tersebut memenuhi definisi aset; dan
 - 2) Pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- j) Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kalau Pusfatekgan melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa Pusfatekgan tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh.

Sama...

Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui dalam laporan posisi keuangan, misalnya, barang atau jasa yang telah didonasikan kepada Pusfatekgan memenuhi definisi aset.

k) Aset kontijensi

- 1) Aset kontijensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pusfatekgan.
- 2) Aset kontijensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomis bagi Pusfatekgan.
- 3) Aset kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontijensi, melainkan diakui sebagai aset.
- 4) Aset kontijensi dikaji ulang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa Pusfatekgan akan memperoleh penghasilan maka dalam laporan keuangan diakui sebagai aset pada periode timbulnya kepastian tersebut.
- 5) Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar (bahwa Pusfatekgan akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomis), Pusfatekgan mengungkapkannya sebagai aset kontijensi.

2. ASET LANCAR

Pusfatekgan mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- a) Pusfatekgan mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- b) Pusfatekgan memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- c) Pusfatekgan mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- d) Kas dan setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Pusfatekgan mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar.

2.1. KAS DAN SETARA KAS

a) Definisi

- 1) Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
- 2) Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu Investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang.
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetor kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca.

- 4) Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.
- 5) Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

b) Penjelasan

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pusfatekgan. Kas terdiri dari; saldo kas (*cash in hand*) dan Rekening Giron (*demand deposits*).
- 2) Setara Kas (*Cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh Setara Kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.
- 3) Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarnya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (*idle fund*).
- 4) Penambahan kas dan setara kas, antara lain, karena:
 - (a) penerimaan tunai dari pelayanan;
 - (b) pelunasan piutang;
 - (c) penerimaan dana dari pemerintah/donator; dan
 - (d) penerimaan tunai lainnya.
- 5) Pengurangan kas dan setara kas, antara lain, karena:
 - (a) pembelian...

- (a) pembelian tunai aset;
- (b) pembayaran kas kepada pemasok/vendor;
- (c) pelunasan hutang; dan
- (d) pembayaran/pengeluaran lainnya.

c) Perlakuan Akuntansi

- 1) Pengakuan (recognition)
 - (a) Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh Pusfatekgan;
 - (b) Kas dan Setara Kas berkurang pada saat digunakan; dan
 - (c) Kas dan Setara Kas berkurang pada saat dicadangkan.
- 2) Pengukuran (Measurement)
 - (a) Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal; dan
 - (b) Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.
- 3) Penyajian (Presentation)

Kas dan Setara Kas merupakan pos yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset/aset dalam neraca.
- 4) Pengungkapan (Disclosure)
 - (a) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen Kas dan Setara Kas.
 - (b) Rincian jenis dan jumlah Kas dan Setara Kas, sebagai berikut:
 - (1) Kas Pusfatekgan
 - (2) Kas Pihak ketiga
 - (3) Kas Negara
 - (c) Kas dan Setara Kas yang dibatasi penggunaannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam aset lancar. Kas dan setara kas tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

d) Ilustrasi...

d) Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat penerimaan Kas dan Setara Kas:

D. Kas dan Setara Kas.....	xxxx
K. Pendapatan Pelayanan	xxxx
K. Piutang	xxxx
K. Aset Bersih	xxxx
- 2) Pada saat penggunaan kas dan setara kas:

D. Aset lain.....	xxxx
D. Pembayaran kas ke pemasok	xxxx
D. Hutang.....	xxxx
D. Beban yang dikeluarkan	xxxx
D. Akun yang dipengaruhi lain	xxxx
K. Kas dan Setara Kas.....	xxxx

2.2. INVESTASI LANCAR/INVESTASI JANGKA PENDEK

a) Definisi

Investasi Lancar adalah penanaman dana dalam waktu tiga sampai dengan dua belas bulan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan.

b) Penjelasan

- 1) Pusfatekgan harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditasnya sebelum melakukan penempatan dananya.
- 2) Investasi Lancar dalam bentuk deposito berjangka harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan, tidak diperkenankan untuk pembelian saham/obligasi.
- 3) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- 4) Investasi Lancar adalah penanaman dana yang bebas risiko atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, misalnya deposito berjangka waktu 3-12 bulan.

5) Pusfatekgan...

- 5) Pusfatekgan harus mengungkapkan mengenai jenis transaksi, jumlah penempatan, dan jenis mata uang dari penempatan tersebut.

c) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

- (a) Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal.
- (b) Pendapatan bunga dari investasi lancar diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan.
- (c) Investasi Lancar berkurang pada saat menerima pencairan dari bank.

2) Pengukuran

Penempatan dana di bank diukur sebesar nilai nominalnya.

3) Penyajian

- (a) Investasi Lancar dalam bentuk deposito disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
- (b) Investasi Lancar dalam bentuk deposito disajikan sebesar nilai nominal.
- (c) Apabila investasi lancar melebihi satu tahun maka akan disajikan pada investasi jangka panjang dalam neraca.

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana.
- (b) Jenis mata uang.
- (c) Tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau per kelompok.
- (d) Jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- (e) Jumlah dana yang dijadikan jaminan dan alasannya.

d) Ilustrasi...

d) Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat Penempatan Dana:

D. Deposito	xxxx
K. Kas dan Setara Kas	xxxx
- 2) Pada saat penerimaan Pendapatan Bunga:

D. Kas dan Setara Kas.....	xxxx
K. Pendapatan Bunga	xxxx
- 3) Pada saat pencairan dana:

D. Kas dan Setara Kas.....	xxxx
K. Deposito	xxxx

2.3. PIUTANG

a) Definisi

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Piutang menurut sumber terjadinya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu piutang pelayanan dan piutang lain-lain.
- 3) Piutang pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan Pusfatekgan, seperti piutang kepada pelanggan pengguna jasa kedirgantaraan.
- 4) Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan kedirgantaraan, seperti piutang bunga.
- 5) Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- 6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

b) Penjelasan...

b) Penjelasan

- 1) Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Pusfatekgan dan pihak lain, yang wajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan;
- 2) Piutang pelayanan diakui pada saat pelayanan telah diberikan tetapi belum menerima pembayaran dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- 3) Transaksi piutang memiliki empat karakteristik, sebagai berikut:
 - (a) Adanya pemberian pelayanan atau penyerahan uang;
 - (b) Persetujuan atau kesepakatan berutang;
 - (c) Jangka waktu tertentu; dan
 - (d) Jaminan.
- 4) Jenis piutang pada Pusfatekgan dikelompokkan menjadi:
 - (a) Piutang pelayanan, antara lain:
 - (1) Piutang Umum/Perorangan,
 - (2) Piutang Pelayanan Lainnya.
 - (b) Piutang lain-lain, antara lain:
 - (1) Piutang bunga;
 - (2) Piutang sewa;
 - (3) Piutang lainnya.

c) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

- (a) Piutang pelayanan diakui pada saat pelayanan (jasa) telah diberikan tetapi belum menerima pembayaran dari pengguna jasa yang bersangkutan.

(b) Piutang...

- (b) Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa atau jatuh tempo penerimaan bunga atas simpanan/investasi.

2) Pengukuran

- (a) Piutang diukur sebesar yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- (b) Piutang tidak tertagih harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penilaian atas kualitas piutang.
- (c) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
- Jatuh tempo piutang; dan
 - Upaya penagihan.
- (d) Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.
- (e) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- (f) Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
- (g) Penggolongan kualitas piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:
- Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - Kualitas...

- Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas macet apabila:
 - dalam jangka 1 (satu) bulan sejak terhitung tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- (h) Penyisihan piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan data historis Pusfatekgan atau bila tidak ada data pendukung yang memadai dapat menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian keuangan sebagai berikut:
- Penyisihan piutang tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5% (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - Penyisihan piutang tidak tertagih khusus ditetapkan sebagai berikut:
 - 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(d) Penyisihan...

- (d) Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban Pusfatekgan untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang ke Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (e) Piutang pelayanan yang tidak terbayar atas permintaan penjamin (diskon atau potongan tarif) menjadi faktor pengurang pendapatan.
- (f) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.
- (g) Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (h) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.
- (i) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.

3) Penyajian

- (a) Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
- (b) Piutang pelayanan dan piutang lain-lain disajikan pada pos yang terpisah.
- (c) Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- (d) Piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

4) Pengungkapan...

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Rincian Jenis, Pihak, Nilai, dan Jangka Waktu;
 - (b) Jumlah Piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - (c) Jumlah Penyisihan kerugian piutang yang dibentuk; dan
 - (d) Jumlah Piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

d) Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat jasa diberikan pada pengguna jasa:

 - D. Piutang Pelayanan xxxx
 - K. Pendapatan Pelayanan..... xxxx

2) Pada saat menerima pembayaran:

 - D. Kas dan Setara Kas xxxx
 - K. Piutang Pelayanan..... xxxx

3) Pada saat melakukan penyisihan kerugian piutang:

 - D. Beban Penyisihan Kerugian
 - Piutang xxxx
 - K. Penyisihan Kerugian Piutang xxxx

4) Pada saat penghapusan piutang:

 - D.Penyisihan Kerugian Piutang xxxx
 - K. Piutang Pelayanan ,..... xxxx

5) Pada saat penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan:

 - D. Kas dan Setara Kas xxxx
 - K. Pendapatan Lain-lain xxxx

2.4. PERSEDIAAN

a) **Definisi**

- 1) Persediaan adalah:

 - (a) aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
 - (b) aset...

- (b) aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; dan
 - (c) aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif
- 2) Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan (kalau ada).

b) Penjelasan

- 1) Persediaan bahan baku dan perlengkapan (supplies) lain yang diadakan untuk digunakan dalam pelayanan jasa atau produksi barang jadi tetap dinilai sebesar harga perolehan apabila jasa atau barang jadi yang dihasilkan dapat dijual sebesar atau di atas harga perolehan.
- 2) Persediaan terdiri dari:
 - (a) Persediaan alat tulis kantor
 - (b) Persediaan souvenir
 - (c) Persediaan bahan baku pembuatan instrumen kedirgantaraan

c) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

- (a) Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan.
- (b) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual.
- (c) Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak.

2) Pengukuran...

2) Pengukuran

- (a) Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai beban pada periode berjalan.
- (b) Pemakaian persediaan ditetapkan dengan metode FIFO (*First In First Out*) secara konsisten dari tahun ke tahun.

3) Penyajian

- (a) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- (b) Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (nilai seandainya dijual), mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Untuk menentukan penilaian persediaan yang tersedia untuk dijual, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) Pada akhir periode laporan harus dibuat daftar perbandingan antara daftar persediaan menurut nilai perolehan dengan daftar persediaan menurut nilai realisasi bersih.
 - (2) Apabila nilai realisasi bersih persediaan lebih tinggi dari nilai perolehan persediaan, maka nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan tetap sebesar nilai perolehannya.
 - (3) Apabila nilai realisasi bersih persediaan rendah dari nilai perolehan persediaan, maka nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dikoreksi dengan nilai menurut realisasi bersih persediaan.

(4) Selisih...

- (4) Selisih kurang antara nilai perolehan persediaannya dengan nilai realisasi bersih persediaan dianggap sebagai beban dalam tahun berjalan dengan akun lawan Selisih Penurunan Nilai Persediaan.
- (5) Apabila pada akhir periode pelaporan terjadi pemulihan(*recovery*) atas nilai persediaan yang telah turun nilainya, maka selisih nilai pemulihan diakui sebagai pengurangan pada akun Selisih Penurunan Nilai Persediaan, maksimal sampai nilai persediaan mencapai nilai perolehannya.
- (c) Persediaan bahan baku dan perlengkapan (supplies) lain yang diadakan untuk digunakan dalam pelayanan jasa kedirgantaraan atau produksi barang jadi disajikan sebesar harga perolehan.
- (d) Persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan pelayanan jasa kedirgantaraan atau untuk memproduksi barang jadi disajikan sebesar harga perolehannya

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut:

- (a) Metode penilaian persediaan (FIFO).
- (b) Nilai tercatat setiap persediaan berdasarkan klasifikasinya dengan memisahkan nilai persediaan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

d) Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat perolehan persediaan:

D. Persediaan..... xxxx

K. Kas/Utang..... xxxx

2) Pada...

- 2) Pada saat pemakaian/penjualan:
- Pemakaian barang untuk pelayanan:
- D. Beban persediaan pelayanan xxxx
- K. Persediaan xxxx
- Penjualan barang untuk pelayanan:
- D. Kas/Piutang..... xxxx
- K. Penjualan..... xxxx

2.5. UANG MUKA

a) Definisi

- 1) Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka dinas dan uang muka pembelian barang/jasa.
- 2) Uang muka dinas adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak Pusfatekgan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran yang sebenarnya untuk kegiatan tersebut dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.
- 3) Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran di muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang/jasa yang pada saat pembayaran tersebut dilakukan barang/jasa tersebut belum diterima oleh Pusfatekgan dan pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

b) Penjelasan

- 1) Uang muka berfungsi antara lain untuk membiayai kelancaran beban operasional Pusfatekgan maupun pihak ketiga.
- 2) Uang muka, antara lain:
 - (a) uang muka dinas; dan
 - (b) uang muka kepada rekanan.

c) Perlakuan...

c) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

- (a) Uang muka diakui pada saat pembayaran kas sebesar jumlah yang dibayarkan.
- (b) Uang muka dinas berkurang pada saat dipertanggungjawabkan.
- (c) Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

2) Pengukuran

- (a) Uang muka diakui sebesar jumlah yang dibayarkan.
- (b) Pada akhir periode pelaporan, uang muka diakui sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui/dibebankan pada periode berjalan.

3) Penyajian

- (a) Uang muka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
- (b) Uang muka disajikan secara neto setelah dikurangi pengakuan/pembebanan periode berjalan.

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Nilai perjanjian
- b) Jangka waktu perjanjian dan pembebanan tiap tahun.

d) Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pembayaran uang muka:

D. Uang Muka xxxx

K. Kas dan Setara Kas xxxx

- 2) Pada saat penggunaan uang muka dinas dipertanggung jawabkan:

(a) Jika...

- (a) Jika uang muka lebih besar dari penggunaan:
 - D. Beban yang Terkait xxxx
 - D. Kas xxxx
 - K. Uang Muka xxxx
- (b) Jika uang muka kurang:
 - D. Beban yang Terikat xxxx
 - K. Uang Muka xxxx
 - K. Kas dan Setara Kas xxxx
- 3) Pada saat penerimaan Barang/Jasa yang dibeli dan pelunasan pembayaran:
 - D. Aset yang terkait xxxx
 - D. Beban Jasa yang terkait xxxx
 - K. Uang Muka xxxx
 - K. Kas dan Setara Kas xxxx

2.6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

a) Definisi

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran beban dimuka, yang manfaatnya akan digunakan untuk satu periode kegiatan Pusfatekgan di masa yang akan datang.

b) Penjelasan

- 1) Biaya dibayar di muka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca Pusfatekgan.
- 2) Biaya dibayar di muka antara lain terdiri:
 - (a) Premi asuransi; dan
 - (b) Sewa dibayar dimuka.

c) Perlakuan Akuntansi

- 1) Pengakuan
 - (a) Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang tetapi jasa/prestasi belum diterima.
 - (b) Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

2) Pengukuran...

2) Pengukuran

- (a) Biaya dibayar di muka dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan.
- (b) Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar di muka dicatat sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui/ dibebankan pada periode berjalan.

3) Penyajian

- (a) Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
- (b) Biaya dibayar di muka disajikan secara neto setelah dikurangi pembebanan setiap periode pelaporan.

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Nilai perjanjian.
- (b) Rincian dari biaya dibayar di muka.
- (c) Jangka waktu dan pembebanan tiap periode pelaporan.

(d) Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pembayaran Biaya Dibayar Dimuka:

D. Biaya Dibaya Dimuka	xxxx
K. Kas dan Setara Kas	xxxx
- 2) Saat pembebanan tahun berjalan dan akhir periode:

D. Beban yang terikat	xxxx
K. Biaya Dibayar Dimuka	xxxx

3. ASET TETAP

a) Definisi

1) Aset tetap

- (a) Aset tetap adalah aset berwujud yang:

(1) Dimiliki...

- (1) Dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif, dan
 - (2) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
- (b) Nilai residu/sisa aset adalah jumlah yang di perkirakan akan diperoleh Pusfatekgan saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
 - (c) Umur manfaat adalah:
 - (1) Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh Pusfatekgan; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut.
- 2) Aset Sewaan
 - (a) Aset sewaan (*Leased Asset*) adalah aset yang diperoleh melalui perjanjian sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.
 - (b) Sewa (*Lease*) adalah suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.
 - (c) Sewa pembiayaan (*Capital lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.
 - (d) Sewa operasi (*Operating lease*) adalah sewa selain sewa pembiayaan.

b) Penjelasan...

b) Penjelasan

- 1) Aset tetap, antara lain, meliputi:
 - (a) Tanah;
 - (b) Gedung dan bangunan;
 - (c) Peralatan dan mesin;
 - (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - (e) Aset Tetap Lainnya; dan
 - (f) Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- 2) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila beban perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam Pusfatekgan.
- 3) Taksiran Umur Ekonomis atas perolehan aset tetap diatur sebagai berikut:

(a) Gedung permanen bertingkat	40 tahun
(b) Gedung permanen, Jalan Irigasi dan Jaringan	25 tahun
(c) Peralatan/mesin dan peralatan dirgantara	5 tahun
(d) Komputer dan kendaraan bermotor	5 tahun
(e) Peralatan kantor dan meubelair	5 tahun
- 4) Metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) yang harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset Pusfatekgan.
- 5) Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang disesuaikan.
- 6) Apabila manfaat ekonomis suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang tersisa.

7) Suatu...

- 7) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas (dijual atau dihibahkan) atau apabila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari pelepasannya.
- 8) Aset tetap dapat diperoleh dari transaksi Sewa (*Lease*), secara *Capital Lease*, sedangkan jika dilakukan dengan *Operating Lease* tidak dicatat sebagai aset tetap.
- 9) Klasifikasi sewa sebagai sewa pemberian atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pemberian adalah:
 - (a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa;
 - (b) *Lessee* mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan;
 - (c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
 - (c) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
 - (d) Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.
- 10) Indikator dari situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pemberian adalah:
 - (a) Jika...

- (a) Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*;
- (b) Laba rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada *lessee* (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan
- (c) *Lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.

c) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

- (a) Aset tetap dicatat dengan menggunakan model biaya.
- (b) Pada awalnya perolehan aset berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap, tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh beban perolehan dan pengembangan tanah, berupa beban pematangan tanah, di luar beban yang ditangguhkan akibat beban legal pengurusan hak.

2) Pengukuran

- (a) Biaya Perolehan Tanah, antara lain, meliputi:
 - (1) Harga Transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
 - (2) Biaya konstruksi atau pengurukan tanah, bila lahan tanah diciptakan
 - (3) Biaya Ganti Rugi penghuni, biaya relokasi;
 - (4) Biaya Komisi perantara jual beli tanah;
 - (5) Biaya Pinjaman terkapitalisasi ke dalam harga tanah; dan
 - (6) Biaya Pematangan Tanah
- (b) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya temasuk biaya impor dan PPN Masukan Tak

Boleh Restitusi (*non refundable*), dan setiap beban yang dapat dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi siap digunakan. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari beban yang dapat dikaitkan secara langsung adalah:

- (1) biaya persiapan tempat;
 - (2) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan beban simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (3) biaya pemasangan (*installation cost*); dan
 - (4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- (c) Biaya perolehan dan masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (d) Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan saet moneter atau aset nonmoneter ataun kombinasi aset moneter dan nonmoneter.
- (e) Apabila pengeluaran untuk memperoleh suatu barang memenuhi kriteria dibawah ini akan dicatat sebagai aset tetap:
 - (1) Nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
 - (2) Digunakan dalam kegiatan pelayanan, disewakan, atau tujuan administratif.
 - (3) Masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- (f) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat berikut:
- (1) Syarat kualitatif yaitu:
 - i. Memperpanjang masa manfaat; atau
 - ii. Meningkatkan kapasitas; atau
 - iii. Meningkatkan standar kinerja.
 - (2) Syarat kumulatif yang jumlahnya disesuaikan

dengan...

dengan ketentuan yang berlaku. Sementara ketentuan tersebut belum ada, maka kapitalisasi biaya perbaikan dapat mengacu pada pedoman sebagai berikut:

- i. Gedung \geq Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- ii. Peralatan dirgantara \geq 10% dari harga perolehan.
- iii. Peralatan non dirgantara \geq 20% dari harga perolehan.

(g) Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti secara periodik dengan nilai yang material, maka penggantian bagian tertentu aset tetap diberlakukan sebagai berikut:

- (1) Nilai tercatat bagian yang akan diganti dihentikan pengakuananya (dikeluarkan dari nilai aset tersebut)
- (2) Nilai perolehan bagian yang menggantikan ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap.

Contoh: penggantian dinamo motor pada genset.

(h) Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.

(i) Penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, paling tidak Pusfatekgan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

(1) Informasi dari luar Pusfatekgan:

- i. Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan (amortisasi);
- ii. Telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi,

- pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat Pusfatekgan beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut;
- iii. Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material;
- (2) Informasi dari dalam Pusfatekgan:
- i. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
 - ii. telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
 - iii. terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diharapkan;
 - iv. aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya; dan
 - v. aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.
- (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dan penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan aktivitas.

3) Penyajian

- (a) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- (b) Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan
- (c) Beban tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah...

tanah disajikan sebagai Beban Tangguhan Hak atas Tanah dalam neraca dan terpisah dari beban tangguhan yang lain pada kelompok Aset Lain-lain.

- (d) Aset kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan terpisah sebagai "Aset Kerjasama Operasi".
- (e) Aset yang diperoleh dengan cara sewa pемbiayaan disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri.

4) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:

- (a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- (b) Metode penyusutan yang digunakan;
- (c) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- (e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan aktivitas;
 - (3) Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan aktivitas, jika ada;
 - (4) Penyusutan; dan
 - (5) Perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

- (a) Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang;
- (b) Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan;
- (c) Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap; dan

(d) Jumlah...

(d) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan aktivitas, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan aktivitas.

e) Ilustrasi Jurnal:

- 1) Perolehan aset tetap dapat dilakukan melalui:
 - (a) Pembelian aset tetap:

D. Aset tetap	xxxx
K. Kas dan Setara Kas.....	xxxx
 - (b) Pembelian tanah:

D. Tanah	xxxx
D. Beban yang ditangguhkan-hak	
Atas tanah	xxxx
K. Kas dan Setara Kas.....	xxxx
 - (c) Pertukaran aset tetap:

D. Aset tetap (baru).....	xxxx
D. Akumulasi penyusutan	xxxx
K. Aset tetap (lama)	xxxx
- 2) Pembebanan Penyusutan:

D. Beban Penyusutan	xxxx
K. Akumulasi penyusutan aset tetap	xxxx
- 3) Amortisasi beban yang ditangguhkan Hak Atas Tanah:

D. Beban Amortisasi	xxxx
K. Beban yang ditangguhkan-hak	
atas tanah	xxxx
- 4) Pada saat penghentian aset tetap (asumsi: tidak ada manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelepasan di masa yang akan datang dan Pusfatekgan mengalami kerugian):

D. Kerugian dari penghentian	
Aset Tetap.....	xxxx
D. Akumulasi penyusutan	xxxx
K. Aset tetap.....	xxxx

5) Pada...

5) Pada saat penjualan:	
D. Kas/Piutang	xxxx
D. Akumulasi penyusutan	xxxx
K. Aset tetap	xxxx

(Dalam penjualan aset tetap dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap.)

4. ASET TAK BERWUJUD

a) Definisi

- 1) Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.
- 2) Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.
- 3) Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai Aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.
- 4) Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

b) Penjelasan

- 1) Aset tak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik;
 - (b) Adanya pengendalian sumber daya; dan
 - (c) Adanya manfaat ekonomis di masa depan.

Jika...

Jika suatu aset ini tidak memenuhi karakteristik tersebut, maka pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menciptakan sendiri aset tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, jika aset tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari *muhibah (Goodwill)* yang diakui pada tanggal akuisisi.

- 2) Pusfatekgan memiliki karyawan terampil atau program (seperti program pelatihan) untuk mendorong para karyawan agar dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Pusfatekgan biasanya juga berharap bahwa para karyawan tersebut menerapkan keterampilannya secara optimal pada Pusfatekgan. Namun, Pusfatekgan belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para karyawan terampil atau dari kegiatan pelatihan sehingga sulit bagi Pusfatekgan untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai Aset tak berwujud. Dengan alasan yang sama, sulit bagi Pusfatekgan untuk menggolongkan talenta teknis atau manajemen khusus sebagai Aset tak berwujud, kecuali Pusfatekgan memiliki hak hukum yang memungkinkannya untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari talenta tersebut dan syarat-syarat lain dari karakteristik Aset tak berwujud dipenuhi.
- 3) Pengeluaran untuk riset tidak diakui sebagai Aset tak berwujud. Contoh-contoh kegiatan riset adalah:
 - (a) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
 - (b) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
 - (c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan
 - (d) Perumusan...

- (d) Perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa.
- 4) Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai Aset tak berwujud sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam PSAK. Contoh-contoh kegiatan pengembangan adalah:
- (a) Pengembangan piranti lunak (*software computer*);
 - (b) Desain, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model sebelum produksi;
 - (c) Desain peralatan, cetakan dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru;
 - (d) Desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial; dan
 - (e) Desain, kontruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki.
- 5) Biaya perolehan Aset tak berwujud yang dihasilkan sendiri terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup, apabila dapat diterapkan:
- (a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan Aset tak berwujud;
 - (b) Gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
 - (c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan utnuk menghasilkan aset; dan
 - (d) Overhead...

- (d) Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (contohnya, alokasi dari depresiasi aset tetap, pembiayaan asuransi, bunga pinjaman, dan sewa).
- 6) Hal-hal berikut bukan merupakan komponen biaya perolehan Aset tak berwujud yang diciptakan sendiri:
- Beban penjualan, beban administratif, dan beban *overhead* lainnya, kecuali pengeluaran ini khusus dilakukan untuk mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan;
 - Inefisiensi dan keteridentifikasi kerugian awal operasi secara jelas yang terjadi sebelum aset yang bersangkutan mencapai kinerja yang direncanakan; dan
 - Pengeluaran pelatihan para pegawai untuk mengoperasikan aset.
- 7) Contoh pengeluaran lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya adalah:
- Pengeluaran untuk kegiatan perintisan (biaya perintisan), kecuali apabila pengeluaran ini termasuk dalam biaya perolehan pos aset tetap;
 - Pengeluaran untuk kegiatan pelatihan;
 - Pengeluaran untuk kegiatan periklanan dan promosi; dan
 - Pengeluaran dalam rangka realokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh Pusfatekgan.
- c) Perlakuan Akuntansi**
- 1) Pengakuan**
- Aset tak berwujud diakui pada saat dikeluarkannya dana untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehannya.
 - Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai beban pengembangan yang ditangguhkan.

2) Pengukuran...

2) Pengukuran

- (a) Aset tak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis.
- (b) Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya.

3) Penyajian

Aset tak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilainya.

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut:

- (a) Golongan Aset tak berwujud yang dihasilkan sendiri dan Aset tak berwujud lain.
- (b) Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.
- (c) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
- (d) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi Aset tak berwujud.
- (e) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode.
- (f) Alasan Pusatekgan jika amortisasi Aset tak berwujud melebihi 20 tahun.
- (g) Keberadaan dan nilai tercatat Aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang.
- (h) Jumlah komitmen untuk memperoleh Aset tak berwujud.

d) Ilustrasi Jurnal

- (1) Pada saat pengeluaran untuk biaya pengembangan atau memperoleh Aset Tak Berwujud.

D. Beban Pengembangan yang

Ditangguhkan xxxx

D. Paten/Aset tak berwujud xxxx

K. Kas dan Setara Kas xxxx

(2) Pada...

- (2) Pada saat amortisasi beban pengembangan yang ditangguhkan
 - D. Beban Pengembangan xxxx
 - K. Beban Pengembangan yang Ditangguhkan xxxx
- (3) Pada saat amortisasi Aset tak berwujud
 - D. Beban Amortisasi Aset tak berwujud xxxx
 - K. Aset tak berwujud xxxx

5. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

a) Definisi

Aset tidak lancar lainnya adalah aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

Komponen aset tidak lancar lainnya:

- 1) Aset yang tidak digunakan merupakan aset yang tidak digunakan untuk operasional dan tidak memberikan manfaat ekonomis pada tanggal pelaporan, misalnya rumah peristirahatan; piutang dalam proses penghapusan; persediaan yang expired; kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dan aset tetap yang rusak.
- 2) Beban yang ditangguhkan merupakan biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan memiliki masa manfaat tertentu, antara lain: Hak Atas Tanah, yaitu biaya pemeriksaan hukum (legal audit), biaya pengukuran dan pematokan ulang, biaya notaris, biaya jual beli dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pajak terkait dengan jual beli tanah dan biaya resmi yang dibayar kepada kas negara.

b) Penjelasan

- 1) Beban tangguhan berupa Hak Atas Tanah diakui sebesar biaya perolehan hak atau biaya perpanjangan hak atau biaya pembaharuan hak. Beban yang ditangguhkan berupa Hak Atas Tanah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak yang masih berlaku.

2) Beban...

- 2) Beban tangguhan yang timbul untuk pengurusan legal hak atas tanah.
- 3) Jika material dinyatakan secara terpisah dalam pos tangguhan dan diamortisasi selama masa manfaat disertai pengungkapan jenis hak, masa berlaku dan cara amortisasi.
- 4) Jika tidak material dibebankan langsung pada tahun berjalan.

c) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Aset yang dihentikan penggunaannya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatatnya dan tidak disusutkan.
- b) Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

2) Penyajian

Pos-pos Aset tidak lancar lainnya disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos aset tidak lancar lainnya, kecuali jika nilai material maka disajikan secara terinci dalam kelompok pos aset tidak lancar lainnya.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi
- (b) Rincian aset tidak lancar lainnya
- (c) Jumlah biaya pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan
- (d) Metode amortisasi dan masa manfaat.

d) Ilustrasi Jurnal

1) Pada saat perolehan:

D. Aset tidak lancar lainnya	xxxx
K. Kas dan Setara Kas	xxxx

2) Pada saat penjualan:

D. Kas dan Setara Kas	xxxx
K. Aset tidak lancar lainnya	xxxx

(Dalam penjualan dapat terjadi keuntungan atau kerugian)

B. AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK

- a) Kewajiban adalah utang Pusfatekgan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya Pusfatekgan yang mengandung manfaat ekonomi.
- b) Karakteristik esensial kewajiban (*Liabilities*) adalah bahwa Pusfatekgan mempunyai kewajiban (*Obligation*) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Misalnya, dengan disertai jumlah yang terutang untuk pembayaran barang dan jasa yang telah diterima.

Kewajiban juga dapat timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Misalnya, sebagai suatu kebijakan, perusahaan memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan sebagai pengganti produk yang cacat tersebut merupakan kewajiban.

- c) Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen Pusfatekgan untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau aset telah diterima atau perusahaan telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Hakekat perjanjian yang tak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya kepada pihak lain apabila Pusfatekgan gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut.

d) Penyelesaian...

- d) Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan Pusfatekgan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:
- 1) pembayaran kas;
 - 2) penyerahan aset lain;
 - 3) pemberian jasa;
 - 4) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
 - 5) konversi kewajiban menjadi aset bersih (ekuitas).
- Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti Keditor membebaskan atau membatalkan haknya.
- f) Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayarkan kembali pinjaman tersebut.
- g) Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Beberapa perusahaan menyebut kewajiban ini sebagai kewajiban diestimasi (*provision*). Dalam pengertian sempit, kewajiban diestimasi semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena kewajiban hanya mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi.

Namun demikian, definisi kewajiban dalam huruf a) mengikuti pendekatan luas. Jadi kalau kewajiban diestimasi menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya hanya harus diestimasi. Contohnya, kewajiban diestimasi untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan kewajiban diestimasi untuk menutup kewajiban manfaat pensiun.

h) Kewajiban...

- h) Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- i) Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- j) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:
 - 1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasional Pusfatekgan; atau
 - 2) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
- k) Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasional lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasional normal Pusfatekgan. Pos-pos operasional seperti itu diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca
- l) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak diharapkan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasional normal Pusfatekgan atau 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, atau juga bisa diartikan semua kewajiban selain yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.
- m) Kewajiban jangka panjang tetap dikategorikan kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca apabila:
 - 1) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waktu lebih lama dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Pusfatekgan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang; dan

- 3) Maksud dari angka 2) didukung perjanjian pemberian kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

2. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a) Definisi

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pusfatekgan kepada pihak lain yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aset lancar atau dengan menimbulkan utang lancar lainnya di masa datang selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

b) Penjelasan

- 1) Kewajiban jangka pendek dikatakan sudah pasti apabila memenuhi dua syarat:
 - (a) Besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan; dan
 - (b) Dapat diukur dengan andal.
- 2) Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:
 - (a) Utang usaha yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan material, investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan Pusfatekgan.
 - (b) Utang gaji/honor pegawai, yaitu kewajiban yang timbul akibat belum dibayarnya gaji atau honor pegawai.
 - (c) Utang pajak yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - (d) Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Pusfatekgan belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

(e) Beban...

- (e) Beban yang masih harus dibayar yaitu beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian beban/bunga yang telah diakui, sampai tanggal neraca tetapi beban secara keseluruhan belum jatuh tempo.
- (f) Dana pihak ketiga yang timbul karena pungutan sebagai wajib pungut pajak atau pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (g) Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo yaitu bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun, misalnya bagian dari pinjaman jangka panjang Pusfatekgan kepada bank atau pihak lainnya yang segera jatuh tempo.
- (h) Utang pembelian aset tetap segera jatuh tempo yaitu bagian utang yang timbul karena pembelian aset tetap Pusfatekgan yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun.
- (i) Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

c) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

- (a) Utang usaha diakui pada saat:
 - (1) transaksi pengadaan material dan jasa lainnya telah memberikan kewenangan kepada Pusfatekgan untuk memiliki/menerima dan mengendalikan sumber daya ekonomi (barang dan jasa) yang bersangkutan; dan
 - (2) timbulnya kewajiban Pusfatekgan untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

(b) Utang gaji...

- (b) Utang gaji/honor diakui pada saat belum diterimanya gaji/honor pegawai Pusfatekgan saat jatuh tempo pembayaran gaji/honor.
- (c) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak ketiga dan Pusfatekgan belum menyerahkan/memberikan manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut.
- (d) Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat Pusfatekgan telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi Pusfatekgan belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut.
- (e) Utang Pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan Pusfatekgan untuk membayar pajak kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (f) Utang lain-lain yang berasal diakui pada saat utang tersebut segera jatuh tempo pada periode berjalan atau kurang dari satu tahun.

2) Pengukuran

- (a) Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/pelunasan oleh Pusfatekgan.
- (b) Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain atau sebesar utang lancar baru yang timbul untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

3) Penyajian

- (a) Kewajiban jangka pendek disajikan dalam Neraca yang terdiri dari: utang usaha, utang gaji/honor pegawai, pendapatan yang diterima dimuka, beban yang harus dibayar, utang pajak, dan utang lain-lain.
- (b) Apabila terdapat akun-akun lain yang jumlahnya material dapat dibentuk pos tersendiri

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut:

- (a) Jumlah dan rincian jenis utang usaha.
- (b) Jumlah dan rincian jenis utang gaji/honor pegawai.
- (c) Jumlah dan rincian jenis pendapatan yang diterima dimuka.
- (d) Jumlah dan rincian jenis beban yang masih harus dibayar.
- (e) Jumlah dan rincian jenis utang pajak.
- (f) Jumlah dan rincian jenis utang lain-lain .
- (g) Jumlah dan rincian kewajiban jangka pendek.

d) Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pengakuan Kewajiban Jangka Pendek:
 - (a) Utang usaha dari pengadaan material dan jasa medis:

D.Persediaan	xxxx
K.Utang Usaha.....	xxxx
 - (b) Penerimaan uang muka KPPN:

D. Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx
K. Uang Muka KPPN.....	xxxx
 - (c) Penerimaan uang untuk pembayaran Sewa Dimuka:

D. Kas dan Setara Kas.....	xxxx
K. Pendapatan Diterima Dimuka	xxxx
 - (d) Beban yang masih harus dibayar:

D. Beban Bunga Bank	xxxx
K. Beban yang Masih Harus Dibayar	xxxx
 - (e) Utang pajak pada saat pembayaran gaji, insentif dan honor pegawai:

D. Beban Pegawai	xxxx
K. Kas dan Setara Kas	Xxxx
K. Utang Pajak	xxxx
 - (f) Reklasifikasi kewajiban jangka panjang menjadi Kewajiban jangka pendek:

D. Utang Jangka Panjang	xxxx
K. Utang Lain-lain Jangka Pendek	xxxx

2) Pada...

- 2) Pada saat pelunasan dengan:
- (a) Pembayaran kas:
 - D. Utang Usaha xxxx
 - D. Beban yang masih harus dibayar xxxx
 - D. Utang Pajak xxxx
 - D. Utang Lain-lain (jangka pendek) xxxx
 - K. Kas dan Setara Kas xxxx
 - (b) Penyerahan jasa atau manfaat ekonomis lainnya:
 - D. Uang Muka KPPN xxxx
 - K. Pendapatan APBN xxxx
 - D. Pendapatan Diterima Dimuka xxxx
 - K. Pendapatan Sewa xxxx

3. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

a) Definisi

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban Pusfatekgan kepada pihak lain yang timbul karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi Pusfatekgan dimasa datang selama jangka waktu lebih dari satu tahun.

b) Penjelasan

Kewajiban jangka panjang antara lain:

- 1) Kredit investasi;
- 2) Pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

c) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

- (a) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat Pusfatekgan mencairkan dana kewajiban tersebut dari pihak pemberi pinjaman.
- (b) Kewajiban jangka panjang diukur sebesar jumlah dana hasil pencairan yang diperoleh ditambah biaya transaksi.
- (c) Selisih antara huruf (b) dengan jumlah pokok diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

(d) Amortisasi...

(d) Amortisasi tersebut diakui sebagian beban bunga.

2) Penyajian

- (a) Kewajiban jangka panjang disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (sisa utang yang belum dibayar ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi).
- (b) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo direklasifikasikan ke kewajiban jangka pendek.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- (a) Jumlah rincian jenis kewajiban jangka panjang.
- (b) Karakteristik umum setiap kewajiban jangka panjang termasuk informasi tingkat bunga dan nama pemberi pinjaman.
- (c) Jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau pembayaran, dan jaminan pinjaman.
- (d) Hal-hal penting lainnya, misalnya persyaratan Kredit (pinjaman) yang tidak dapat dipenuhi.

d) Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat menerima pinjaman jangka panjang:

D.Kas dan Setara Kas	xxxx
D. Biaya tangguhan pinjaman	xxxx
K. Utang Jangka Panjang	xxxx
- 2) Pada saat pembayaran bunga pinjaman yang jatuh tempo:

D. Beban Bunga	xxxx
K. Kas dan setara kas	xxxx
- 3) Pada saat pengakuan bunga pinjaman yang belum dibayar di akhir periode laporan:

D. Beban bunga	xxxx
K. Utang bunga pinjaman jangka panjang ...	xxxx
- 4) Pada saat amortisasi biaya transaksi pinjaman di akhir periode laporan:

D. Beban amortisasi biaya tangguhan pinjaman	xxxx
---	------

K. Akumulasi...

K. Akumulasi amortisasi biaya tangguhan pinjaman	xxxx
5) Pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek:	
D. Utang jangka panjang	xxxx
K. Kewajiban jangka pendek	xxxx

C. AKUNTANSI EKUITAS

1. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK

- a) Ekuitas adalah hak residual atas aset Pusfatekgan setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.
- b) Ekuita Pusfatekgan terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.

2. EKUITAS TIDAK TERIKAT

- a) Definisi

Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat Pusfatekgan antara lain meliputi:

- 1) Ekuitas Awal

Merupakan hak residual awal Pusfatekgan yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali Pusfatekgan ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

- 2) Surplus dan Defisit Tahun Lalu

Merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode sebelumnya.

- 3) Surplus dan Defisit Tahun Berjalan

Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

- 4) Ekuitas Donasi

Merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

b) Perlakuan...

b) Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

- (a) Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan Pusfatekgan;
- (b) Ekuitas diakui pada saat diterimanya sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- (c) Ekuitas diakui pada saat diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- (d) Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

2) Pengukuran

Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar:

- (a) Nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan Pusfatekgan
- (b) Nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
- (c) Nilai perolehan atau nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- (a) Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- (b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - i. Rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya;
 - ii. Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.

3. EKUITAS TERIKAT TEMPORER

a) Definisi

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaanya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh Pusfatekgan.

Pembatasan...

Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup:

- 1) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
- 2) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
- 3) Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu di masa depan;
- 4) Dana untuk memperoleh aset tetap

b) Pengakuan

Ekuitas terikat temporer diakui pada saat:

- 1) Ditetapkannya nilai kekayaan Pusfatekgan;
- 2) Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer;
- 3) Diterimanya aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer.

c) Pengukuran

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:

- 1) Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan Pusfatekgan.
 - 2) Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat temporer.
- d) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.

e) Penyajian dan pengungkapan

- 1) Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - i. Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya;
 - ii. Informasi mengenai sifat dan pembatas ekuitas terikat temporer.

4. EKUITAS TERIKAT PERMANEN

a) Definisi

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.

Ekuitas...

Ekuitas terikat permanen meliputi:

- 1) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;
- 2) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen;
- 3) Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

b) Pengakuan

Ekuitas terikat permanen diakui pada saat:

- 1) Ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
- 2) Diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen.
- 3) Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

c) Pengukuran

Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar:

- 1) Nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan Pusfatekgan.
- 2) Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen.
- 3) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal.
- 4) Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - i. Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya;
 - ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

5. ILUSTRASI JURNAL

- 1) Pada saat penetapan Kekayaan Awal berdirinya BLU:

D. Aset Lancar	xxxx
D. Aset Tetap.....	xxxx
D. Aset Lain-lain	xxxx
K. Kewajiban.....	xxxx
K. Ekuitas (Ekuitas Awal)	xxxx
 - 2) Pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset diluar anggaran DIPA Pusfatekgan:

D. Kas dan Setara Kas.....	xxxx
D. Persediaan	xxxx
D. Aset Tetap	xxxx
K. Ekuitas Donasi	xxxx
 - 3) Pada saat terjadi revaluasi nilai aset (setelah disahkan oleh Menteri Keuangan):

D. Aset Tetap (nilai revaluasi-nilai awal)	xxxx
K. Ekuitas Awal	xxxx
 - 4) Pada saat Penghasilan dan Sumbangan ditutup ke Ekuitas:

D. Pendapatan Usaha	xxxx
K. Ekuitas (Surplus & Defisit tahun berjalan)	xxxx
K. Pengurang Pendapatan Usaha	xxxx
 - 5) Pada saat Beban dan Kerugian ditutup ke Ekuitas:

D. Ekuitas (Surplus & Defisit tahun berjalan)	xxxx
K. Beban Pelayanan	xxxx
K. Beban Umum dan Administrasi.....	xxxx
K. Beban Lainnya.....	xxxx
K. Kerugian Lain	xxxx
 - 6) Pada saat Keuntungan (Kerugian) luar biasa ditutup ke Ekuitas:

D. Keuntungan Luar Biasa	xxxx
K. Ekuitas (Surplus & Defisit tahun berjalan)	xxxx
- D. Ekuitas...

D. Ekuitas (Surplus & Defisit
tahun berjalan) xxxx
K. Kerugian Luar Biasa xxxx

D. ILUSTRASI FORMAT NERACA

SATKER PUSFATEKGAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	999.999	999.999	999.999	99.99
Investasi Jangka Pendek	999.999	999.999	999.999	99.99
Piutang Pelayanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Piutang lain-lain	999.999	999.999	999.999	99.99
Persediaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Uang Muka	999.999	999.999	999.999	99.99
Biaya dibayar di Muka	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Aset Lancar	999.999	999.999	999.999	99.99
Investasi Jangka Panjang	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset Tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Tanah	999.999	999.999	999.999	99.99
Gedung dan Bangunan	999.999	999.999	999.999	99.99
Peralatan dan Mesin	999.999	999.999	999.999	99.99
Jalan, irigasi, dan Jaringan	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset tetap lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Konstruksi dalam penggerjaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Aset Tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Akumulasi Penyusutan	999.999	999.999	999.999	99.99
Nilai Buku Aset Tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset Lainnya				
Aset Sewa	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset Tak berwujud	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset Lain-lain	999.999	999.999	999.999	99.99

Jumlah...

Jumlah Aset Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH ASET	999.999	999.999	999.999	99.99
KEWAJIBAN	999.999	999.999	999.999	99.99
Kewajiban Jangka Pendek	999.999	999.999	999.999	99.99
Utang Usaha	999.999	999.999	999.999	99.99
Utang Pajak	999.999	999.999	999.999	99.99
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Diterima Di Muka	999.999	999.999	999.999	99.99
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999.999	999.999	999.999	99.99
Utang Jangka Pendek Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	999.999	999.999	999.999	99.99
Kewajiban Jangka Panjang	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH KEWAJIBAN	999.999	999.999	999.999	99.99
EKUITAS	999.999	999.999	999.999	99.99
Ekuitas	999.999	999.999	999.999	99.99
Ekuitas Awal	999.999	999.999	999.999	99.99
Surplus dan Defisit Tahun Lalu	999.999	999.999	999.999	99.99
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	999.999	999.999	999.999	99.99
Ekuitas Donasi	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH EKUITAS	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	999.999	999.999	999.999	99.99

Tabel 3. Contoh Neraca

BAB V...

BAB V

LAPORAN AKTIVITAS

A. AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Pengertian dan Karakteristik

- a) Pendapatan (*Revenues*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Pusfatekgan selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas.
- b) Penghasilan (*Income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan.

2. Penjelasan

Pendapatan Pusfatekgan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga), yaitu:

- a) Pendapatan Usaha

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok selama periode akuntansi tertentu. Pendapatan usaha Pusfatekgan antara lain meliputi pendapatan operasional dari jasa layanan, pendapatan operasional dari non jasa layanan, dan pendapatan operasional lainnya.

- 1) Pendapatan Operasional Dari Jasa Layanan

Pendapatan operasional dari jasa layanan Pusfatekgan terdiri atas pendapatan penjualan data, pendapatan BIMTEK pengolahan data, pendapatan penjualan instrumen kedirgantaraan, dan pendapatan dari info data spasial.

- 2) Pendapatan Operasional Dari Non Jasa Layanan

Pendapatan operasional dari non jasa layanan terdiri atas pendapatan atas pendapatan hibah dan pendapatan dari APBN.

(a) Pendapatan...

(a) Pendapatan hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi Pusfatekgan untuk menyerahkan barang/jasa berupa uang, barang (persediaan dan aset tetap) diakui sebagai pendapatan.

(b) Pendapatan dari APBN

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari APBN (rupiah murni) yang tertuang dalam bentuk DIPA Pusfatekgan untuk membiayai operasional maupun kegiatan investasi Pusfatekgan.

3) Pendapatan Operasional Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi Pusfatekgan.

b) Pendapatan Non Usaha

Merupakan pendapatan yang timbul dari aktivitas di luar usaha pokok selama satu tahun periode akuntansi tertentu. Pendapatan non usaha Pusfatekgan terdiri dari pendapatan bunga deposito dan jasa giro.

c) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

d) Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal Pusfatekgan, yang tidak berulang dan di luar kendali Pusfatekgan.

3. Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan

- 1) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan

transaksi...

transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- (a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
 - (b) Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke satker;
 - (c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
 - (d) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.
- 2) Pendapatan non usaha lainnya diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
 - 3) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontijensi.
 - 4) Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 5) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
 - 6) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh Pusfatekgan.

b) Pengukuran

- 1) Pendapatan usaha dari Jasa Layanan dan Pendapatan Usaha Lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- 2) Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.
- 3) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

4) Pendapatan...

- 4) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLU.
- 5) Pengukuran pendapatan di atas menggunakan asas bruto.

c) Penyajian

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

d) Pengungkapan

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Ilustrasi Jurnal

- a) Pada saat pengakuan pendapatan Usaha dari Jasa Layanan:

D. Kas dan Setara Kas/Piutang	xxxx
K. Pendapatan Pelayanan	xxxx
- b) Pada saat realisasi SPM/SP2D dan APBN (LS dan GUP):

D. Persediaan/Beban/Aset Tetap	xxxx
K. Pendapatan APBN Operasional	xxxx
K. Pendapatan APBN Investasi	xxxx
- c) Pada saat menerima hibah:

D. Kas dan Setara Kas/Persediaan/ Aset Tetap	xxxx
K. Pendapatan Hibah	xxxx

B. AKUNTANSI BEBAN

1. Pengertian dan Karakteristik

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

2. Penjelasan

Beban Pusfatekgan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Beban Usaha

Merupakan beban yang terkait langsung dalam mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional...

operasional Pusfatekgan. Beban usaha Pusfatekgan antara lain meliputi beban jasa pelayanan dan pembelian data, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan kendaraan, beban penyusutan aktiva tetap, beban amortisasi, beban perlengkapan kantor dan persediaan habis pakai, beban koran/majalah, beban keperluan harian kantor, beban rapat, beban sewa, beban jasa profesi, dan beban pajak.

b) Beban Non Usaha

Merupakan seluruh beban yang timbul dari kegiatan di luar kegiatan umum Pusfatekgan. Beban non usaha antara lain meliputi beban administrasi giro bank, beban transfer, dan beban pajak bunga.

3. Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan

- 1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan dirgantara, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan.
- 2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

b) Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
- 2) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
- 3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
- 4) Jumlah kerugian yang terjadi.

c) Penyajian

Beban dikelompokkan tersendiri dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai pengurang pendapatan usaha.

d) Pengungkapan...

d) Pengungkapan

- 1) Pusfatekgan harus mengungkapkan rincian beban berdasarkan jenisnya dalam catatan atas laporan keuangan.
- 2) Tambahan pengungkapan untuk estimasi dari PSAK tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi.

4. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat pengeluaran Beban dari dana APBN dan Dana PNBP:

D. Beban Pelayanan.....	xxxx
D. Beban Pegawai	xxxx
D. Beban Pemeliharaan	xxxx
D. Beban Langganan daya dan Jasa	xxxx
D. Beban Administrasi Kantor	xxxx
K. Kas/Bank	xxxx
K. Pendapatan APBN	xxxx
- b. Pada saat akhir periode pelaporan terdapat beban yang masih harus dibayar (Beban langganan daya dan jasa):

D. Beban Langganan daya dan jasa	xxxx
K. Beban yang masih harus dibayar	xxxx
- c. Pada saat pemberian keringanan:

D. Kas	xxxx
D. Beban Subsidi	xxxx
K. Pendapatan	xxxx

C. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN AKTIVITAS

SATKER PUSFATEKGAN

LAPORAN AKTIVITAS

TAHUN 20X1 DAN 20X0

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN) JUMLAH	%
PENDAPATAN USAHA				
Pendapatan Operasional Dari Jasa Layanan				
Pendapatan Penjualan Data	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Bimtek Pengolahan Data	999.999	999.999	999.999	99.99

Pendapatan....

Pendapatan Penjualan Instrumen Kedirgantaraan	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan dari Info Data Spasial	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Operasional Dari Non Jasa Layanan				
Pendapatan APBN BA 82	999.999	999.999	999.999	99.99
TOTAL PENDAPATAN USAHA	999.999	999.999	999.999	99.99
BEBAN USAHA				
Beban Jasa Pelayanan dan Pembelian Data	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Perjalanan Dinas	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Pemeliharaan Kendaraan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Penyusutan Aktiva tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Amortisasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Perlengkapan Kantor dan Persediaan Bahan Habis Pakai	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Koran/Majalah	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Keperluan Harian Kantor	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Rapat	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Sewa	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Jasa Profesi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Pajak	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH BEBAN USAHA	999.999	999.999	999.999	99.99
PENDAPATAN OPERASIONAL	999.999	999.999	999.999	99.99
PENDAPATAN NON USAHA				
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	999.999	999.999	999.999	99.99
BEBAN NON USAHA				
Beban Administrasi Giro Bank	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Transfer	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Pajak Bunga	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN/ KERUGIAN				
Kerugian/(keuntungan) Penjualan Aset	999.999	999.999	999.999	99.99
Kerugian/(keuntungan) Penurunan Nilai	999.999	999.999	999.999	99.99
Kerugian/(keuntungan) Lain - lain	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN	999.999	999.999	999.999	99.99

Tabel 4. Contoh Laporan Aktivitas

BAB VI...

BAB VI

LAPORAN ARUS KAS

1. PENGERTIAN

a) Tujuan

Informasi tentang arus kas Pusfatekgan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan Pusfatekgan yang bersangkutan di dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan Pusfatekgan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai laporan keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan Pusfatekgan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

Tujuan pernyataan ini adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari Pusfatekgan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi.

b) Ruang Lingkup

Pusfatekgan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (integral) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Para pemakai laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana Pusfatekgan menghasilkan dan menggunakan usaha, serta untuk melunasi kewajiban. Pernyataan ini mewajibkan Pusfatekgan menyajikan laporan arus kas dengan metode langsung.

c) Definisi

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam Pedoman ini didefinisikan sebagai berikut:

- a) Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan;

b) Kas...

- b) Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro;
- c) Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan;
- d) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas;
- e) Aktivitas operasi (operasional) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan Pusfatekgan (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi maupun pendanaan;
- f) Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas; dan
- g) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman Pusfatekgan, seperti:
 - 1) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
 - 2) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment fund*); dan
 - 3) Bunga dan deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang

2. DASAR PENGATURAN

- 1. Kas dan Setara Kas, terdiri dari:
 - a) Kas;
 - b) Giro;
 - c) Deposito maksimal berjangka waktu 3 (tiga) bulan.
- 2. Laporan Arus Kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3. Pelaporan...

3. Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional Pusfatekgan dengan menggunakan metode langsung (direct method); dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
4. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto;
 - a) penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas Pusfatekgan; dan
 - b) penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat (*maturity short*).
5. Arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto:
 - a) Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pembayaran kembali deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap;
 - b) Penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain; dan
 - c) Pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah.
6. Pelaporan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang dijelaskan pada PSAK, arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih.
7. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih;
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas Pusfatekgan; dan
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu singkat (*Maturity short*).

8. Arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalikan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar antara mata uang fungsional dengan mata uang asing pada tanggal transaksi arus.
9. Arus kas dari bunga dan deviden yang diterima dan dibayarkan, masing-masing harus diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan.
10. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi.
11. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

3. PENJELASAN PENYUSUNAN

1. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih Pusfatekgan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
2. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan Pusfatekgan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flow*). Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi Pusfatekgan.

3. Informasi...

3. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari transaksi arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.
4. Pusfatekgan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis Pusfatekgan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan Pusfatekgan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut.
5. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman oleh Pusfatekgan meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
6. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya Pusfatekgan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajiban, memelihara kemampuan operasional Pusfatekgan, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.
7. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Pusfatekgan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

a) Penerimaan kas...

- a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
 - b) Penerimaan kas royalti, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
 - c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - d) Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
 - e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain;
 - f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; dan
 - g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan (*dealing*)
8. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari Aktivitas Investasi adalah:
- a) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
 - b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain;
 - c) Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan);
 - d) Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan);
 - e) Uang muka...

- e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan Kedit yang diberikan oleh lembaga keuangan);
 - f) Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan Kedit yang diberikan oleh lembaga keuangan);
 - g) Pembayaran kas sehubungan dengan kontrak *futute, forward, opsi* dan *swap*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai kativitas pendanaan; dan
 - h) Penerimaan kas dari kontrak *futute, forward, opsi* dan *swap*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai kativitas pendanaan.
9. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal Pusfatekgan.
- Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
- a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen modal lain;
 - b) Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menembus saham entitas;
 - c) Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang;
 - d) Pelunasan pinjaman;
 - e) Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.
10. Pusfatekgan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung.

Dengan...

Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik:

- a) Dari catatan akuntansi Pusfatekgan; atau
 - b) Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk:
 - 1) Perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan;
 - 2) Pos bukan kas lain, dan
 - 3) Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan
11. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dan termasuk perbedaan, jika ada, seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode.
 12. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antaraperiode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.
 13. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.
 14. Penyajian tersendiri pengaruh arus kas dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain sebagai pos tunggal, bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri atas jumlah aset dan liabilitas yang diperoleh atau dilepaskan, akan membantu membedakan arus kas tersebut dengan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan lainnya.

Pengaruh arus kas atas kehilangan pengendalian tidak boleh dikurangkan dari arus kas untuk memperoleh pengendalian.

15. Pengertian unit bisnis lainnya yang dimaksud untuk penetapannya di Pusfatekgan adalah unit bisnis lainnya yang berada di luar bisnis utama Pusfatekgan.

D. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS KAS

SATKER
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20X1 DAN 20X0
(METODE LANGSUNG)

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN) JUMLAH	%
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
Arus Masuk				
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Hibah	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan APBN (rupiah murni)	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Usaha Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus Keluar				
Biaya Layanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Biaya Umum dan Administrasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Biaya Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Masuk				
Hasil Penjualan Aset Tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	999.999	999.999	999.999	99.99
Hasil Penjualan Aset Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus Keluar				

Perolehan...

Perolehan Aset Tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Perolehan Investasi Jangka Panjang	999.999	999.999	999.999	99.99
Perolehan Aset Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Masuk				
Perolehan Pinjaman	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus Keluar				
Pembayaran Pokok Pinjaman	999.999	999.999	999.999	99.99
Pemberian Pinjaman	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pendanaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Kenaikan Neto Kas	999.999	999.999	999.999	99.99
Kas dan Setara Kas Awal	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Saldo Kas	999.999	999.999	999.999	99.99

Tabel 5. Contoh Laporan Arus Kas

BAB VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENGERTIAN

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum Pusfatekgan sebagai PK-BLU, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi panting lainnya.
2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus dirujuk (direferensikan) dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Dalam pedoman ini diatur yang harus diungkapkan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.

4. Secara...

4. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas;
 - c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - d) Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya; dan
 - e) Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldonya. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan beban.
6. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan Pusfatekgan, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan
 - c) Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

B. DASAR PENGATURAN

1. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan Pusfatekgan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Pusfatekgan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada Pusfatekgan.
2. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka kenyataaan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha Pusfatekgan tidak dapat digunakan.
3. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
4. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten kecuali:
 - a) setelah terjadinya perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi atau mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan Kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan PSAK;
 - b) perubahan tersebut diperkenakan oleh suatu PSAK.
5. Pusfatekgan mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, Pusfatekgan menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:

a) Nama entitas...

- a) Nama entitas pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan informasi dari akhir periode laporan sebelumnya;
 - b) Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;
 - c) Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;
 - d) Mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK: Mata Uang Pelaporan; dan
 - e) Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.
6. Pusfatekgan harus mengungkapkan informasi yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan.
 7. Pusfatekgan mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi Pusfatekgan.
 8. Pusfatekgan menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat meyediakan informasi yang andal dan lebih relevan.
 9. Catatan atas laporan keuangan:
 - a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan PSAK;
 - b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan
 - c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
 10. Pusfatekgan mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:
 - a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; dan
 - b) Kebijakan...

- b) Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.
11. Pusfatekgan mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:
- a) Domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat Pusfatekgan (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor);
 - b) Keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama;
 - c) Nama pegawai/manajemen Pusfatekgan; dan
 - d) Bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas.

C. UNSUR-UNSUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum Pusfatekgan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan gambaran umum Pusfatekgan, antara lain:

- a) Pendirian Pusfatekgan;
- b) Riwayat ringkas Pusfatekgan;
- c) Dasar pendirian Pusfatekgan dan perubahan terakhir;
- d) Bidang usaha utama Pusfatekgan sesuai dasar pendirian dan kegiatan utama Pusfatekgan pada periode pelaporan;
- e) Tempat kedudukan Pusfatekgan dan lokasi utama kegiatan usaha;
- f) Tanggal mulai beroperasinya Pusfatekgan. Apabila Pusfatekgan melakukan ekspansi atau pencuitan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau pencuitan usaha, manfaat dan pembahahan kapasitas pelayanan;
- g) Nama pegawai/manajemen dan beserta klasifikasi dan kualifikasinya.

1) Ikhtisar Kebijakan...

1) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan ikhtisar kebijakan akuntansi, antara lain:

- (a) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - (1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (*historical cost*), biaya kini (*current cost*), nilai realisasi (*realizable value*), nilai sekarang (*present value*), nilai wajar (*fair value*) berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
 - (2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - (3) Siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran.
- (b) Kebijakan Akuntansi Tertentu
 - Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Pengakuan pendapatan;
 - (2) Penggabungan usaha dalam lingkup manajemen Pusfatekgan;
 - (3) Pengakuan beban;
 - (4) Kapitalisasi pengeluaran;
 - (5) Investasi;
 - (6) Persediaan;
 - (7) Definisi kas dan setara kas;
 - (8) Piutang dan penyisihan piutang;
 - (9) Aset tetap, penyusutan dan penghapusan;
 - (10) Sewa guna usaha;
 - (11) Aset tak berwujud dan amortisasi;
 - (12) Penurunan nilai aset;
 - (13) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
 - (14) Program pensiun;
 - (15) Hibah terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi; dan
 - (16) Pendapatan APBN.

2) Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Laporan Neraca dan Laporan Aktivitas, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan:

a) Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar

(1) Perubahan Estimasi Akuntansi:

- (a) hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
- (b) jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan
- (c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang atau jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis.

(2) Perubahan Kebijakan akuntansi:

- (a) hakikat, alasan dan tujuan perubahan kebijakan akuntansi;
- (b) jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
- (c) jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa ssebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- (d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.

(3) Kesalahan Mendasar:

- (a) hakikat kesalahan mendasar;
- (b) jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;

(c) Jumlah koreksi...

- (c) jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- (d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.

b) Komitmen dan Kontinjensi

(1) Komitmen:

- (a) kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: perjanjian jual beli dan komitmen investasi;
- (b) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- (c) periode berlakunya komitmen;
- (d) nilai total komitmen, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
- (e) sanksi-sanksi; dan
- (f) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batas-batasannya.

(2) Kontinjensi

- (a) perkara/sengketa hukum:
 - pihak-pihak yang terkait;
 - jumlah yang diperkarakan; dan
 - latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (*legal opinion*);
- (b) uraian singkat tentang peraturan pemerintah yang mengikat dan dampaknya terhadap Pusfatekgan, seperti masalah ketenagakerjaan.

c) Informasi Penting Lainnya

Sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Pusfatekgan, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup Pusfatekgan.

d) Peristiwa...

d) Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

- (1) Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk diterbitkan dan pihak yang memberikan persetujuan serta pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan setelah penerbitan.
- (2) Informasi terkini atas kondisi yang ada pada tanggal neraca yang diterima setelah tanggal neraca dan jumlah moneter yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan.
- (3) Jenis peristiwa dan estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dibuat, jika peristiwa setelah tanggal neraca sangat penting tetapi tidak memerlukan penyesuaian.

e) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya

- (1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas Pusfatekgan.
- (2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.

f) Reklasifikasi

Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

g) Rasio-rasio keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan Pusfatekgan untuk menilai kinerja Pusfatekgan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, aktivitas, laporan arus kas). Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan Keditur untuk membuat keputusan atas perimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek di masa datang. Salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi, yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan.

Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaianya. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu, analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang di masa yang akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Tetapi bila hanya memperhatikan satu alat rasio saja tidaklah cukup, sehingga harus dilakukan pula analisis persaingan-persaingan yang sedang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam industri yang lebih luas, dan dikombinasikan dengan analisis kualitatif atas bisnis dan industri manufaktur, analisis kualitatif, serta penelitian-penelitian industri.

D. ILUSTRASI...

D. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

**BADAN LAYANAN UMUM LAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 20XB DAN
20XA**

1. UMUM :

- a) Pusfatekgan didirikan pada tanggal xx bulan xx tahun xxxx sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor xxx Tahun xxxx yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun xxxx Nomor xxx tanggal xx bulan xx tahun xxxx. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Pusfatekgan pada akhir 20XB adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Ketua Dewan Pengawas :

Anggota Dewan Pengawas : 1.....
2.....
3.....

Manajemen

Kepala Pusat :

(Jumlah dan nama jabatan manajemen disesuaikan dengan Surat Keputusan Pusfatekgan yang bersangkutan)

- b) Kegiatan utama Pusfatekgan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas di bidang pelayanan, pemanfaatan, dan bimbingan teknis di bidang penginderaan jauh.
- 2) Melaksanakan pelayanan, pemanfaatan, dan jasa konsultasi di bidang teknologi dirgantara terapan.
- 3) Mengevaluasi kesesuaian dan kepatuhan penyelenggaraan layanan pemanfaatan teknologi kedirgantaraan terhadap Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Pengelolaan Teknis yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala LAPAN dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

c) Pusfatekgan...

- c) Pusfatekgan merupakan satuan kerja yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat di bidang kedirgantaraan berupa:

No.	Layanan	Sub Layanan
1.	Penginderaan Jauh	- Data Spasial - Informasi Spasial - Database Spasial - Analisis Spasial - Bimbingan Teknis Inderaja
2.	Teknologi Dirgantara Aplikasi/Terapan	- Sistem Konversi Angin - Instrumen Kedirgantaraan - Laboratorium Aerodinamika

Tabel 4. Produk Layanan Kedirgantaraan

- d) Untuk pelaksanaan kegiatan dan usaha tersebut Pusfatekgan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING:

- a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
- 1) Laporan keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun atas dasar akual dengan konsep biaya historis.
 - 2) Laporan arus kas disusun atas dasar kas dengan metode langsung. Pusfatekgan memperhitungkan deposito berjangka yang jatuh temponya tidak lebih dari 3 bulan dari tanggal perolehannya sebagai setara kas.
 - 3) Periode akuntansi Pusfatekgan adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b) Pengakuan...

- b) Pengakuan Pendapatan dan Beban:
- 1) Sumbangan dari pihak lain di luar pemerintah dan subsidi pemerintah diakui berdasarkan penerimaan kas atau Aktiva non kas.
 - 2) Pendapatan jasa pelayanan diakui pada saat jasa pelayanan selesai dilaksanakan.
 - 3) Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (dasar akual).
- c) Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
- Piutang lancar sebesar 5 permil setelah dikurangi dengan nilai agunan
 - Piutang kurang lancar sebesar 10% setelah dikurangi dengan nilai agunan
 - Piutang diragukan sebesar 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan
 - Piutang macet sebesar 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan
- d) Persediaan dinilai dengan menggunakan biaya perolehannya dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
- e) Investasi terdiri dari investasi lancar dan investasi jangka panjang. Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak melebihi 1 tahun pada saat penempatan disajikan sebagai investasi lancar. Penempatan dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun pada saat penempatan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Investasi property disajikan sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan.
- f) Aset tetap
- 1) Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan digunakan, dengan cara garis lurus;

2) Berdasarkan...

- 2) Berdasarkan taksiran masa manfaatnya dengan prosentase tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut:
 - (a) Gedung permanen bertingkat 40 tahun
 - (b) Gedung permanen, Jalan Irigasi, dan Irigasi 25 tahun
 - (c) Peralatan dan Mesin 5 tahun
 - (d) Komputer dan kendaraan bermotor 5 tahun
 - (e) Peralatan kantor dan meubelair 5 tahun
- 3) Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan aktivitas tahun berjalan. Sedangkan perbaikan, penambahan, pemugaran, perluasan dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset dikapitalisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - (b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Hak atas tanah dikapitalisasi senilai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut. Selanjutnya hak atas tanah diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya berdasarkan surat perizinan.

g) Sewa

- 1) Transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai *capital lease* apabila memenuhi Kriteria sebagai berikut:
 - (a) Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya sewa guna usaha.
 - (b) Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa guna usaha beserta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha.

(c) Masa sewa...

- (c) Masa sewa guna usaha minimal dua tahun.
 - 2) Transaksi sewa guna usaha yang tidak memenuhi Kriteria tersebut dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (*Operating lease*).
 - 3) Menurut metode *capital lease*, aset yang disewaguna usahakan disajikan dalam pos "aset tetap" sedangkan kewajibannya disajikan dalam pos "Utang Sewa".
 - 4) Aset sewa guna usaha dan hutang sewa guna usaha diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Aset sewa guna usaha disusutkan berdasarkan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.
- h) Aset tak berwujud
- 1) Aset tak berwujud Pusfatekgan terdiri dari Aset tak berwujud hasil riset dan Aset tak berwujud yang dihasilkan secara intern.
 - 2) Hasil Riset diukur sebesar biaya perolehannya dan diamortisasi selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan secara intern berupa kapitalisasi biaya pengembangan sistem informasi Pusfatekgan. Biaya pengembangan tersebut diukur sebesar biaya perolehannya yang mencakup:
 - (a) pengeluaran bahan dan jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan sistem baru;
 - (b) gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan sistem baru;
 - (c) pengeluaran langsung terkait (seperti biaya pendaftaran hukum) dalam menghasilkan sistem baru; dan
- (d) overhead...

- (d) overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem baru yang telah dialokasikan secara rasional dan konsisten (seperti alokasi penyusutan, premi asuransi, dan sewa).
- 4) Biaya pengembangan sistem informasi Pusfatekgan diamortisasi selama 5 (lima) tahun dengan menggunakan metode garis lurus (maksimal 20 tahun sesuai PSAK).
- i) Penurunan Nilai Aset

Pusfatekgan mengakui rugi penurunan nilai aset tetap berwujud khususnya peralatan dengan nilai diatas Rp. 2 miliar apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dan suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal neraca, Pusfatekgan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya pemulihan.
- j) Klasifikasi Aset Bersih
 - 1) Pusfatekgan menyajikan sumbangan berupa kas atau aset non kas sebagai sumbangan terikat jika sumbangan tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aset bersih terikat temporer digolongkan kembali menjadi aset bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan.
 - 2) Pusfatekgan menyajikan sumbangan berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dari penyumbang.

Sumbangan...

Sumbangan aset tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

- 3) Subsidi pemerintah diakui sebagai penambah aset bersih terikat temporer. Jika pembatasan dari pemerintah telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aset bersih terikat temporer digolongkan kembali menjadi aset bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan.
- k. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
 - 1) Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
 - 2) Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan.
 - 3) Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan kewajiban moneter adalah kurs jual PT Bank ABC, dimana Pusfatekgan melakukan sebagian besar transaksi valuta asing, yaitu sebesar Rp xxx untuk US \$ 1,00 per 31 Desember 20XB dan Rp xxx untuk US \$ 1,00 per 31 Desember 20XA. Sebagai pembanding atas kurs yang digunakan tersebut, kurs jual Bank Indonesia untuk satu dolar US masing-masing sebesar Rp xxx per 31 Desember 20XB dan Rp xxx per 31 Desember 20XA.

(Apabila dalam prakik terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka Pusfatekgan dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang obyektif).

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Kas dan setara kas

Pos ini merupakan saldo uang tunai, giro, dan deposito berjangka yang jatuh temponya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan pada beberapa bank per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>20XB</u>	<u>20XA</u>
Kas		
Rupiah	Rp xxxx	Rp xxxx
Mata uang asing	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Kas	Rp xxxx	Rp xxxx
Bank		
• Rupiah		
◦ Bank Kami	Rp xxxx	Rp xxxx
◦ Bank Kita	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Bank Rupiah	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
• Mata uang asing		
◦ Bank Kami	Rp xxxx	Rp xxxx
◦ Bank Kita	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Bank Mata Uang Asing	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Deposito Berjangka		
• Rupiah		
◦ Bank Kami	Rp xxxx	Rp xxxx
◦ Bank Kita	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Deposito Berjangka		
Rupiah	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
• Mata uang asing		
◦ Bank Kami	Rp xxxx	Rp xxxx
◦ Bank Kita	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Deposito Berjangka		
Mata Uang Asing	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>

Tingkat...

Tingkat bunga per tahun berkisar antara X% sampai dengan Y% pada tahun 20XB dan antara Z% sampai dengan W% pada tahun 20XA untuk deposito berjangka rupiah. Sedangkan untuk deposito berjangka mata uang asing tingkat bunga per tahun berkisar antara D% sampai dengan E% pada tahun 20XB dan antara F% sampai dengan G% pada tahun 20XA. (*Jika terdapat kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya secara signifikan maka harus diungkapkan jumlah dan ikatan-ikatan yang terkait*)

b. Investasi Lancar

Pos ini merupakan saldo uang tunai, giro, dan deposito berjangka yang jatuh temponya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan pada beberapa bank per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Deposito Berjangka		
• Rupiah		
○ Bank Kami	Rp xxxx	Rp xxx
○ Bank Kita	Rp xxxx	Rp xxx
Jumlah Deposito Berjangka Rupiah	Rp xxxx	Rp xxx
• Mata uang asing		
○ Bank Kami	Rp xxxx	Rp xxx
○ Bank Kita	Rp xxxx	Rp xxx
Jumlah Deposito Berjangka		
Mata Uang Asing	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Deposito Berjangka	Rp xxxx	Rp xxxx

Tingkat bunga per tahun berkisar antara X% sampai dengan Y% pada tahun 20XB dan antara Z% sampai dengan W% pada tahun 20XA untuk deposito berjangka rupiah. Sedangkan untuk deposito berjangka mata uang asing tingkat bunga per tahun berkisar antara D% sampai dengan E% pada tahun 20XB dan antara F% sampai dengan G% pada tahun 20XA.

c. Piutang...

c. **Piutang pelayanan**

Pos ini merupakan saldo piutang pelayanan per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>20XB</u>	<u>20XA</u>
Piutang Pelayanan		
• Piutang Pelayanan Penginderaan		
Jauh	Rp xxxx	Rp xxxx
• Piutang Pelayanan Teknologi		
Terapan	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Piutang Pelayanan (bruto)	Rp xxxx	Rp xxxx
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Piutang		
Pelayanan	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Piutang Pelayanan Bersih	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>

Perubahan penyisihan kerugian piutang pelayanan sebagai berikut:

	<u>20XB</u>	<u>20XA</u>
Saldo awal tahun	Rp xxxx	Rp xxxx
Penyisihan tahun berjalan	Rp xxxx	Rp xxxx
Penghapusan piutang pelayanan	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Saldo akhir tahun	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
<i>(Jika terdapat piutang pelayanan yang dijadikan agunan pinjaman bank maka harus diungkapkan jumlah dan ikatan-ikatan yang terkait)</i>		

d. **Piutang Lain-lain**

Pos ini merupakan saldo piutang lain-lain per 31 Desember 20XB dan 20XA dengan rincian sebagai berikut:

	<u>20XB</u>	<u>20XA</u>
Piutang lain-lain		
• Piutang Sewa	Rp xxxx	Rp xxxx
• Piutang Cicilan	Rp xxxx	Rp xxxx
• Piutang Karyawan	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Piutang Lain-lain (bruto)	Rp xxxx	Rp xxxx

e. **Persediaan**

Pos ini merupakan saldo persediaan per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Persediaan		
• Persediaan Barang Konsumsi	Rp xxxx	Rp xxxx
• Persediaan Bahan Untuk Pemeliharan	Rp xxxx	Rp xxxx
• Persediaan Suku Cadang	Rp xxxx	Rp xxxx
• Pita, Cukai, Materai, dan Leges	Rp xxxx	Rp xxxx
• Persediaan Bahan Baku	Rp xxxx	Rp xxxx
• Persediaan lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Persedian	Rp xxxx	Rp xxxx

(Jika terdapat persediaan yang sudah kadaluarsa, dihapuskan dan dijadikan jaminan maka harus diungkapkan jumlah dan ikatan-ikatan yang terkait.)

f. **Uang Muka**

Pos ini merupakan saldo uang muka per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Uang muka dinas	Rp xxxx	Rp xxxx
Uang muka kepada pemasok	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Uang Muka	Rp xxxx	Rp xxxx

(Untuk uang muka dinas dirinci lebih lanjut berdasarkan batas waktu pertanggungjawaban yang tersisa, misalnya dikelompokan menurut ketentuan masing-masing Pusfatekgan tetapi di bawah 1 tahun)

g. **Beban Dibayar Dimuka**

Pos ini merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian, sebagai berikut:

Premi...

	20XB	20XA
Premi Asuransi	Rp xxxx	Rp xxxx
Sewa Dibayar Dimuka	Rp xxxx	Rp xxxx
Pembayaran Dimuka Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	Rp xxxx	Rp xxxx

Premi asuransi dibayar dimuka untuk jangka waktu dua tahun sebesar Rpxxx, dari jumlah tersebut yang dimasukkan dalam pos Beban Dibayar Dimuka sebesar Rpxxx dan sisanya (untuk yang akan diterima manfaatnya di atas satu tahun) disajikan dalam pos Beban Ditangguhkan pada kelompok pos aset lain-lain.

(Jika terdapat banyak beban dibayar dimuka yang sebagian disajikan sebagai Beban Dibayar Dimuka dan sebagian sisanya disajikan sebagai Beban Ditangguhkan maka dapat dibuat dalam bentuk tabel perincian)

h. Investasi Jangka Panjang

Pos ini merupakan saldo penempatan dana yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun dan investasi properti per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Penempatan dana	Rp xxxx	Rp xxxx
Penyertaan modal KSO	Rp xxxx	Rp xxxx
Properti yang dibeli dengan tujuan untuk dijual	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Properti yang dibeli dengan tujuan untuk disewakan	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp xxxx	Rp xxxx

Tingkat bunga per tahun berkisar antara X% sampai dengan Y% pada tahun 20XB dan antara Z% sampai dengan W% pada tahun 20XA untuk penempatan dana. Investasi properti dibeli untuk dijual kembali merupakan biaya perolehan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Hidup Bahagia, Jakarta.

Nilai...

Nilai wajar investasi tanah sebesar Rp xxxx pada tahun 20XB. Investasi properti dibeli untuk disewakan merupakan nilai tercatat (nilai buku) dari bangunan yang disewakan untuk menginap keluarga pasien, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Biaya Perolehan Bangunan yang Disewakan	Rp xxxx	Rp xxxx
Akumulasi Penyusutan	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Tercatat (Buku)	Rp xxxx	Rp xxxx

(Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting lainnya yang terkait dengan investasi jangka panjang, misalnya investasi yang dijadikan jaminan pinjaman Pusfatekgan dan perubahan-perubahan penting pada ikatan perjanjian investasi.)

i. **Aset Tetap**

Pos ini merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 20XB			
	20XA	Penambahan	Pengurangan	20XB
Biaya Perolehan:				
Tanah	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Jaringan Fisik Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Kerjasama				
Operasi	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Sewa Guna				
Usaha:				
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Konstruksi Dalam Penggerjaan (Pelaksanaan)	0	Rp xxxx	0	Rp xxxx
Total	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
 Akumulasi Penyusutan:				
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Gedung...				

Gedung dan Bangunan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Fisik Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Kerjasama				
Operasi	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Sewa Guna				
Usaha:				
Peralatan dan				
Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Total	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Buku Bersih	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx

31 Desember 20XA

	20XA	Penambahan	Pengurangan	20XB
Biaya Perolehan:				
Tanah	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Fisik Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Kerjasama Operasi	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Sewa Guna Usaha:				
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Total	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Akumulasi Penyusutan:				
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Fisik Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Kerjasama Operasi	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Sewa Guna Usaha:				
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Total	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Buku Bersih	Rp xxxx			Rp xxxx

Apabila Pusfatekgan melakukan penilaian kembali aset tetap pada tanggal xx bulan xxx tahun xxxx. Penilaian kembali dilakukan oleh intern Pusfatekgan (*atau pihak lain selaku penilai*

Independen...

independen) dengan menggunakan metode tertentu (sebutkan istilah metode yang digunakan). Penilaian kembali tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan/Peraturan Pemerintah yang berlaku (sebutkan SK/peraturan terkait). Rincian hasil penilaian kembali aset tetap yang dicatat oleh Pusfatekgan pada tahun 20XB adalah sebagai berikut:

	Penilaian Kembali	Nilai Tercatat	Selisih Penilaian Kembali
<u>Biaya Perolehan</u>			
Tanah	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Fisik Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Total	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx

e Penilaian kembali aset tetap ini menambah/mengurangi nilai aset bersih Pusfatekgan. Penilaian kembali tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan surat keputusan No. xxx tanggal xx bulan xxxx tahun xxxx apabila terdapat Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) maka dibuat daftar rincian bangunan dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 20XB adalah sebagai berikut:

Contoh :

20XB	Nilai Kontrak	Prosentase Penyelesaian	Akumulasi Biaya	Estimasi Penyelesaian
<u>Bangunan:</u>				
Ruang	Rp xxxx	xx%	Rp xxxx	31 Des 20XF
Kebidanan				
Gedung	Rp xxxx	xx%	Rp xxxx	30 Juni
Apotik				20XD
Total	Rp xxxx		Rp xxxx	

Tanah...

Tanah dan bangunan di xxxx digunakan sebagai jaminan hutang jangka pendek dan hutang jaminan jangka panjang. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dibayar untuk dua tahun berikutnya adalah sebesar Rpxxx.

(Selain itu Pusfatekgan juga harus mengungkapkan ikatan yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha, jaminan yang diberikan, dan keuntungan/kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale and leaseback, jika ada).

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang dibuat/disediakan oleh investor ABC dengan jangka waktu kerjasama operasi selama xx tahun dan dinilai sebesar nilai wajarnya pada saat penyerahan Rp xxxx. Selama jangka waktu tersebut atas hasil dari aset kerjasama operasi akan dilakukan bagi hasil setiap periodenya dengan komposisi x% untuk Pusfatekgan dan Y% untuk investor. Selain itu, Pusfatekgan juga harus membayar bunga sebesar x% dari nilai wajar aset kerjasama operasi yang diserahkan dan dikelola oleh Pusfatekgan. Aset kerjasama operasi tersebut disusutkan dengan menggunakan metode dan presentase penyusutan yang sama dengan aset sejenis yang dimiliki Pusfatekgan.

j. **Aset tak berwujud**

Pos ini merupakan saldo Aset tak berwujud per 31 Desember 20XB dan 20XA,dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 20XB				
	20XA	Penambahan	Pengurangan	20XB
Biaya Perolehan:				
Biaya Pengembangan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Akumulasi Amortisasi:				
Biaya Pengembangan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Buku Bersih		Rp xxxx		Rp xxxx

Pusfatekgan...

(Pusfatekgan harus mengungkapkan alasan untuk Aset tak berwujud yang masa manfaatnya ditentukan lebih dari 5 tahun)

k. Aset Lain-lain

Pos ini merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 20XB dan 20XA dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Uang Jaminan	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset yang sudah tidak dimanfaatkan	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban ditangguhkan	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset BOT	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Aset Lain-lain	Rp xxxx	Rp xxxx

1. Utang Usaha

Pos ini merupakan saldo utang usaha per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Utang Kepada Pihak ke III	Rp xxxx	Rp xxxx
Utang Jasa Pelayanan	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Utang Usaha	Rp xxxx	Rp xxxx

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	20XB	20XA
Sampai dengan 1 bulan	Rp xxxx	Rp xxxx
> 1 bulan-3 bulan	Rp xxxx	Rp xxxx
> 3 bulan-6 bulan	Rp xxxx	Rp xxxx
> 6 bulan-1 tahun	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Utang Usaha	Rp xxxx	Rp xxxx

Utang investasi segera jatuh tempo sebesar Rpxxx merupakan utang investasi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dari total investasi seluruhnya sebesar Rpxxxx. (Catatan 18.a)

m. Pendapatan...

m. Pendapatan Diterima Dimuka

Pos ini merupakan saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	Rp xxxx	Rp xxxx

n. Beban yang Masih harus Dibayar

Pos ini merupakan saldo beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Beban Layanan Daya dan Jasa yang masih harus dibayar	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Bunga yang Masih harus Dibayar	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban yang Masih harus Dibayar Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Beban yang Masih harus Dibayar	Rp xxxx	Rp xxxx

o. Utang Pajak

Pos ini merupakan saldo utang pajak per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Utang PPN	Rp xxxx	Rp xxxx
Utang PPh pasal 21	Rp xxxx	Rp xxxx
Utang PPh pasal 22	Rp xxxx	Rp xxxx
Utang PPh pasal 23	Rp xxxx	Rp xxxx
Utang PPh pasal 26	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Utang Pajak	Rp xxxx	Rp xxxx

p. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pos ini merupakan saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

Utang...

	20XB	20XA
Utang Jangka Panjang segera Jatuh Tempo	Rp xxxx	Rp xxxx
Utang Jangka Pendek Lain	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx

Utang jangka pendek segera jatuh tempo sebesar Rpxxx merupakan utang jangka panjang sewa guna usaha pemberian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dari total utang sewa guna usaha pemberian seluruhnya sebesar Rp xxxx.

q. Kewajiban Jangka Panjang

Pos ini merupakan saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Utang Investasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Utang Sewa Guna Usaha Pemberian	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Kewajiban jangka Panjang	Rp xxxx	Rp xxxx

a. Utang Investasi

	20XB	20XA
Utang Investasi Jangka panjang	Rp xxxx	Rp xxxx

Pusfatekgan memperoleh utang investasi dari Bank XYZ sebesar Rpxxx. Jumlah fasilitas pinjaman yang tersedia Rpxxx. Pinjaman diperoleh dengan agunan tanah dan gedung kantor di Jl. xxx (catatan 9). Utang investasi tersebut akan dilunasi melalui angsuran setengah tahunan selama tiga tahun yang berakhir tanggal xx bulan xxxx tahun xxxx. Tingkat bunga pinjaman selama tahun berjalan adalah xx%. (Jika ada, tambahkan pengungkapan mengenai sejarah pinjaman dan perubahan-perubahan penting pada ikatan perjanjian pinjaman).

b. Utang Sewa...

b. Utang Sewa Guna Usaha Pembiayaan

Kewajiban yang berasal dari transaksi sewa guna usaha pembiayaan adalah sebagai berikut:

	20XB	20XA
Kurang dari 1 tahun	Rp xxxx	Rp xxxx
Antara 1-2 tahun	Rp xxxx	Rp xxxx
Antara 2-x tahun	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah	Rp xxxx	Rp xxxx
DiRurangi: Beban bunga yang belum jatuh tempo	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Tunai sewa guna pembiayaan	Rp xxxx	Rp xxxx
Bagian jangka pendek	Rp xxxx	Rp xxxx
Bagian jangka panjang	Rp xxxx	Rp xxxx

Pusfatekgan memperoleh peralatan x dan mesin y melalui transaksi sewa guna usaha pembiayaan (*jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting lainnya yang terkait dengan ikatan perjanjian sewa guna usaha pembiayaan*).

r. Kewajiban Lain-lain

Pos ini merupakan saldo kewajiban lain-lain misalnya berupa pinjaman subordinasi yang diterima Pusfatekgan per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Utang Subordinasi:		
PT Senang Sehat	Rp xxxx	-
ABC	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Utang Subordinasi	Rp xxxx	Rp xxxx

Utang subordinasi...

Utang subordinasi kepada PT Senang Sehat dalam rupiah dikenakan bunga x%. Utang ini disubordinasikan atas utang investasi. Sedangkan utang subordinasi kepada ABE dalam rupiah dikenakan bunga y% disubordinasikan atas utang sewa guna usaha pembiayaan. (Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting yang berkaitan dengan ikatan perjanjian pinjaman subordinasi.)

s. Aset Bersih Tidak Terikat

Pos ini merupakan saldo aset bersih tidak terikat per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Aset Bersih Tidak Terikat	Rp xxxx	Rp xxxx

Aset bersih tidak terikat dapat digunakan secara bebas oleh Pusfatekgan sesuai dengan sifat, maksud, tujuan dan kegiatannya tanpa ada pembatasan dari pihak lain. Sumber aset bersih tidak

terikat berasal dari penghasilan dan sumbangan tidak terikat (Rincian lebih lanjut lihat Laporan Aktivitas). (Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting yang berkaitan dengan ikatan perjanjian pinjaman subordinasi.)

t. Aset Bersih Terikat Temporer

Pos ini merupakan saldo aset bersih terikat temporer per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Aset bersih untuk program tertentu:		
• Program A	Rp xxxx	Rp xxxx
• Program B	Rp xxxx	Rp xxxx
• Subsidi gaji pegawai negeri sipil	Rp xxxx	Rp xxxx
• Subsidi pemeliharaan rutin	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset bersih yang dibatasi untuk program tertentu		
Aset bersih yang sedang dikumpulkan		
untuk perolehan aset tetap	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Aset Bersih Terikat Temporer	Rp xxxx	Rp xxxx
		Dana sumbangan...

Dana sumbangan tersebut berasal dari xxx dan harus disimpan di bank selama x tahun. Jika masa penyimpanan sudah melebihi masa tersebut. Pusfatekgan diperkenankan untuk bebas menggunakannya dan dipindahkan sebagai aset bersih tidak terikat. (*Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting yang berkaitan dengan pembatasan aset terikat temporer dan hal-hal lainnya*)

u. Aset Bersih Terikat Permanen

Pos ini merupakan saldo aset bersih terikat permanen per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Aset Bersih yang harus dipertahankan dan hasilnya ditambahkan pada jumlah sumbangan semula hingga mencapai Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset bersih yang harus dipertahankan dan hanya dapat digunakan hasilnya:		
Aset tetap yang tidak boleh dijual	Rp xxxx	Rp xxxx
Bantuan pemerintah untuk renovasi aset tetap yang dapat dikapitalisasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Aset Bersih Terikat Permanen	Rp xxxx	Rp xxxx
<i>(Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting yang berkaitan dengan pembahasan aset bersih terikat temporer dan hal-hal lainnya.)</i>		

v. Penghasilan dan Sumbangan Tidak Terikat

Pos ini mempakan saldo Penghasilan dan Sumbangan Tidak Terikat per 31 Desember 20XB dan 20XA dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan...

20XB 20XA

Pendapatan Operasional Jasa Layanan

Penjualan Data	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan Bimtek Pengolahan Data	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan Penjualan Instrumen	Rp xxxx	Rp xxxx
Kedirgantaraan	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan dari Info Data Spasial	Rp xxxx	Rp xxxx

Pendapatan Lain – lain

Pendapatan dari Piutang Pelayanan yang telah dihapus buku	Rp xxxx	Rp xxxx
---	---------	---------

Pengurang Pendapatan Operasional

• Retur Penjualan Data	(Rp xxx)	(Rp xxx)
------------------------	----------	----------

Pendapatan Non-Operasional

• Pendapatan Investasi	Rp xxxx	Rp xxxx
• Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	Rp xxxx	Rp xxxx
• Pendapatan KSO lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx
• Pendapatan Sewa	Rp xxxx	Rp xxxx
• Keuntungan penjualan aset tetap	Rp xxxx	Rp xxxx
• Penerimaan ganti rugi negara	Rp xxxx	Rp xxxx
• Pendapatan non-operasional lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx

Sumbangan Tidak Terikat

• Subsidi pemerintah (APBN)	Rp xxxx	Rp xxxx
• Sumbangan non-pemerintah	Rp xxxx	Rp xxxx

Jumlah Penghasilan dan Sumbangan tidak Terikat

Rp xxxx Rp xxxx

Pendapatan investasi dalam penghasilan non-operasional merupakan jumlah bersih (netto) setelah dikurangi dengan beban yang terkait untuk memperoleh pendapatan investasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan...

20XB 20XA

Pendapatan dari Penempatan Dana:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| • Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun | Rp xxxx | Rp xxxx |
| • Beban Administrasi dan lain-lain | (Rp xxxx) | (Rp xxxx) |
| Pendapatan Bersih | Rp xxxx | Rp xxxx |
| • Penempatan dana yang jatuh temponya
lebih dari 1 tahun | Rp xxxx | Rp xxxx |
| • Beban Administrasi dan lain-lain | (Rp xxxx) | (Rp xxxx) |
| Pendapatan bersih | Rp xxxx | Rp xxxx |

Pendapatan bersih dari Penempatan Dana

Pendapatan sewa dalam penghasilan non-operasional merupakan jumlah bersih (neto) setelah dikurangi dengan beban yang terkait untuk memperoleh pendapatan sewa atas investasi properti bangunan tersebut (Catatan 8), dengan rincian sebagai berikut:

20XB 20XA

Pendapatan Sewa dari Investasi Properti:

- | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| • Investasi Properti Bangunan | Rp xxxx | Rp xxxx |
| • Beban Penyusutan | (Rp xxxx) | (Rp xxxx) |
| • Beban Pemeliharaan Bangunan, dll | (Rp xxxx) | (Rp xxxx) |
| Pendapatan sewa bersih | Rp xxxx | Rp xxxx |

Pendapatan sewa bersih

(Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi mengenai sumbangan aset (non-kas) yang diterima tetapi tidak dapat ditentukan nilai wajarnya secara layak, sumbangan jasa yang diterima tetapi tidak memenuhi Kriteria sumbangan jasa, dan hal-hal penting lainnya.)

w. Beban...

w. **Beban dan Kerugian**

Pos ini merupakan saldo Beban dan Kerugian per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Beban Usaha		
• Beban jasa pelayanan dan pembelian data	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban perjalanan dinas	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban pemeliharaan kendaraan	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban pemeliharaan AC	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban penyusutan aset tetap	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban amortisasi	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban operasional kendaraan dinas	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban ATK dan persediaan	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban keperluan harian kantor	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban rapat	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban sewa	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban jasa profesi	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban pajak	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban komunikasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Non Usaha		
• Beban administrasi giro bank	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban transfer	Rp xxxx	Rp xxxx
• Beban pajak bunga	Rp xxxx	Rp xxxx
Kerugian Lainnya		
• Rugi penurunan nilai aset	Rp xxxx	Rp xxxx
• Rugi pelepasan aset	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Beban dan Kerugian	Rp xxxx	Rp xxxx

x. **Penghasilan dan Sumbangan Terikat Temporer**

Pos ini merupakan saldo Penghasilan dan Sumbangan Terikat Temporer per 31 Desember 20XB dan 20XA, dengan rincian sebagai berikut:

Sumbangan...

	20XB	20XA
Sumbangan Terikat Temporer		
• Subsidi gaji PNS	Rp xxxx	Rp xxxx
• Subsidi biaya rutin	Rp xxxx	Rp xxxx
• Sumbangan non pemerintah dalam negeri	Rp xxxx	Rp xxxx
• Sumbangan non pemerintah luar negeri	Rp xxxx	Rp xxxx
Penghasilan Terikat Temporer		
• Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	Rp xxxx	Rp xxxx
• Pendapatan Kerjasama Operasi	Rp xxxx	Rp xxxx
• Pendapatan Investasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Penghasilan dan Sumbangan Terikat Temporer	Rp xxxx	Rp xxxx

(Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi mengenai sumbangan aset (non-kas) yang diterima tetapi tidak dapat ditentukan nilai wajarnya secara layak, sumbangan jasa yang diterima tetapi tidak memenuhi Kriteria sumbangan jasa, dan hal-hal penting lainnya.)

y. **Keuntungan (Kerugian) Luar Biasa**

Sebagai contoh pos ini merupakan kerugian luar biasa yang terjadi pada tanggal xx bulan xxxx tahun 20XB karena terjadi bencana alam banjir yang mengakibatkan kerusakan pada sebagian bangunan Pusfatekgan. Total kerugian mencapai Rp xxxx yang membebani aset bersih tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen, dengan rincian sebagai berikut:

	20XB	20XA
Kerugian luar biasa yang mengurangi aset bersih tidak terikat	Rp xxxx	-
Kerugian luar biasa yang mengurangi aset bersih terikat temporer	Rp xxxx	-
Kerugian luar biasa yang mengurangi aset bersih terikat permanen	Rp xxxx	-
Jumlah Kerugian Luar Biasa	Rp xxxx	-

BAB VIII

SISTEM AKUNTANSI ASET

A. Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara

Barang Milik Negara disajikan di dalam Laporan Keuangan dalam klasifikasi sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan akuntansi disajikan berdasarkan klasifikasi BMN berdasarkan pos-pos neraca. Kebijakan akuntansi mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos aset berwujud barang ke dalam Laporan Keuangan.

a. Aset Lancar

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat, aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat. Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

Berikut...

Berikut adalah kode buku besar dan perkiraan/akun Persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar:

Kode BB	Nama Perkiraan
1151	Persediaan
11511	Persediaan untuk Bahan Operasional
115111	Barang Konsumsi
115112	Amunisi
115113	Bahan untuk Pemeliharaan
115114	Suku Cadang
11512	Persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada
115121	Pita Cukai, Meterai dan leges
115122	Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
115123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
115124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
115125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
115126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
115127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
11513	Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
115131	Bahan Baku
115132	Barang dalam Proses
115199	Persediaan Bahan Lainnya
115191	Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga
115192	Persediaan Barang Hasil Sitaan
115199	Persediaan Lainnya

Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil **inventarisasi fisik**.

Persediaan...

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengeraaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar:

- 1) **Biaya perolehan**, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah **biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh**.
- 2) **Biaya standar**, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- 3) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengungkapan Persediaan Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Kondisi persediaan;

4) Hal-hal...

- 4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tata cara penatausahaan persediaan mengacu kepada perdirjen perbendaharaan Nomor : Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

b. Aset Tetap

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

Mapping PMK No.97/PMK.06/2007 ke Perkiraan-perkiraan

Aset Tetap berupa Tanah dalam Neraca

Klasifikasi BMN Menurut PMK No.97/PMK.06/2007		Perkiraan Buku Besar Aset dalam BAS	
Kode Bidang	Nama Bidang		Nama Perkiraan
1.01	Tanah	131111	Tanah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, semua tanah harus dibukukan dalam Daftar Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca berapapun nilai tanah tersebut.

Pengakuan...

Pengakuan Tanah

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan Tanah

Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:
 - (1) Saldo awal;
 - (2) Mutasi tambah /penambahan dan jenis transaksi untuk penambahannya;
 - (3) Mutasi kurang beserta jenis transaksi untuk pengurangannya.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

Mapping PMK...

Mapping PMK No.97/PMK.06/2007 ke Perkiraan-perkiraan

Aset Tetap berupa

Peralatan dan Mesin dalam Neraca

Klasifikasi BMN Menurut PMK No.97/PMK.06/2007		Perkiraan Buku Besar Aset dalam BAS	
Kode Bidang	Nama Bidang	Kode BB	Nama Perkiraan
2.01	Alat Besar	131311	Peralatan dan
2.02	Alat Angkutan		Mesin
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
2.04	Alat Pertanian		
2.05	Alat Kantor & Rumah		
2.06	Tangga		
	Alat Studio, Komunikasi		
2.07	dan Pemancar		
	Alat Kedokteran dan		
2.08	Kesehatan		
2.11	Alat Laboratorium		
2.12	Alat Persenjataan		
2.13	Komputer		
2.14	Alat Eksplorasi		
2.15	Alat Pemboran		
	Alat Produksi, Pengolahan		
2.16	& Pemurnian		
2.17	Alat Bantu Eksplorasi		
2.18	Alat Keselamatan Kerja		
2.19	Alat Peraga		
	Unit Peralatan Proses/ Produksi		

Menurut...

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Peralatan dan Mesin yang harus dibukukan dalam Daftar Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca adalah:

- Semua Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2010,
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh setelah 1 Januari 2010 dengan biaya perolehannya lebih besar atau sama dengan Rp 300.000,

Peralatan dan mesin yang tidak memenuhi Kriteria di atas dibukukan dalam daftar barang ekstrakomptabel dan tidak dilaporkan dalam neraca.

Pengakuan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Saldo awal;
 - (2) Jumlah penambahan dan jenis transaksinya;
 - (3) Jumlah mutasi kurang beserta jenis transaksi untuk pengurangannya.
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Gedung dan Bangunan yang harus dibukukan dalam Daftar Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca adalah:

- Semua Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2010.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh setelah 1 Januari 2010 dengan biaya perolehannya lebih besar atau sama dengan Rp 10.000.000.

Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi Kriteria di atas dibukukan dalam daftar barang ekstrakomptabel dan tidak dilaporkan.

Mapping PMK No.97/PMK.06/2007 ke Perkiraan-perkiraan

Aset Tetap berupa

Gedung dan Bangunan dalam Neraca

Klasifikasi BMN Menurut PMK No.97/PMK.06/2007		Perkiraan Buku Besar Aset dalam BAS	
Kode Bidang	Nama Bidang	Kode BB	Nama Perkiraan
1.06	Bangunan Gedung	131511	Gedung dan
1.08	Bangunan Menara		
1.09	Rambu-rambu		bangunan
1.10	Tugu Titik Kontrol		

Pengakuan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika asset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, semua jalan, irigasi dan jaringan harus dibukukan dalam daftar barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca berapapun nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.

Mapping PMK No.97/PMK.06/2007 ke Perkiraan-perkiraan

Aset Tetap berupa

Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Neraca

Klasifikasi BMN Menurut PMK No.97/PMK.06/2007		Perkiraan Buku Besar Aset dalam BAS	
Kode Bidang	Nama Bidang	Kode BB	Nama Perkiraan
1.02	Jalan dan jembatan	131711	Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.03	Bangunan Air		
1.04	Instalasi		
1.05	Jaringan		

Pengakuan...

Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan...

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, semua aset tetap lainnya harus dibukukan dalam daftar barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca berapapun nilai Aset Tetap Lainnya tersebut.

Mapping PMK No.97/PMK.06/2007 ke Perkiraan-perkiraan

Aset Tetap berupa

Aset Tetap Lainnya dalam Neraca

Klasifikasi BMN Menurut PMK No.97/PMK.06/2007		Perkiraan Buku Besar Aset dalam BAS	
Kode Bidang	Nama Bidang	Kode BB	Nama Perkiraan
2.09	Koleksi	131911	Aset Tetap
2.10	Perpustakaan/Buku		Lainnya
	Barang Bercorak		
3.01	Kesenian/		
3.02	Kebudayaan/Olah Raga		
3.03	Hewan		
	Ikan		
	Tanaman		

Hewan, ikan dan tanaman yang dimasukkan ke dalam Aset Tetap Lainnya adalah yang diperoleh sebelum 1 Januari 2010. Untuk yang diperoleh setelah tanggal tersebut dibukukan dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel dan tidak dilaporkan dalam Neraca.

Pengakuan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.

Biaya...

Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Mapping PMK No.97/PMK.06/2007 ke Perkiraan-perkiraan

Aset Tetap berupa

Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca

Klasifikasi BMN Menurut PMK No.97/PMK.06/2007		Perkiraan Buku Besar Aset dalam BAS	
Kode Golongan	Nama Golongan	Kode BB	Nama Perkiraan
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	132111	Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- biaya...

- biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (4) Uang muka kerja yang diberikan;
- (5) Retensi.

Perolehan BMN Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Sebagai contoh, Kuasa Pengguna Barang membeli PC Unit dan Printer dengan harga gabungan yaitu Rp10.500.000. Jika ke dua barang tersebut dibeli secara terpisah, maka harga PC Unit sejenis berharga Rp9.000.000 dan harga printer sejenis adalah Rp3.000.000. Karena pencatatan akuntansi untuk PC Unit dan Printer dilakukan secara terpisah, maka perhitungan harga untuk masing-masing barang tersebut adalah sebagai berikut:

PC Unit...

PC Unit: Rp9.000.000 x Rp10.500.000 = Rp7.875.000
Rp9.000.000+Rp3.000.000

Printer: Rp3.000.000 x Rp10.500.000=Rp2.625.000
Rp9.000.000+Rp3.000.000

Aset Bersejarah

Aset bersejarah tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam PMK No.97/PMK.06/2007 Aset Bersejarah adalah BMN yang termasuk dalam bidang dengan kode 1.07.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

- a) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- b) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- c) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset Tetap dalam Renovasi

Aset tetap dalam renovasi terjadi bila instansi telah melakukan renovasi atas gedung kantor yang bukan miliknya. Secara umum, apabila renovasi gedung kantor telah mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor, maka pengeluaran belanja tersebut akan disajikan oleh instansi yang melakukan renovasi tersebut sebagai aset tetap dalam renovasi pada akun aset tetap lainnya di neraca instansi yang bersangkutan.

Perlakuan atas renovasi pada gedung dan bangunan yang bukan milik instansi yang melaksanakan renovasi, sebagai berikut:

- (1) Apabila renovasi di atas meningkatkan manfaat ekonomik gedung, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

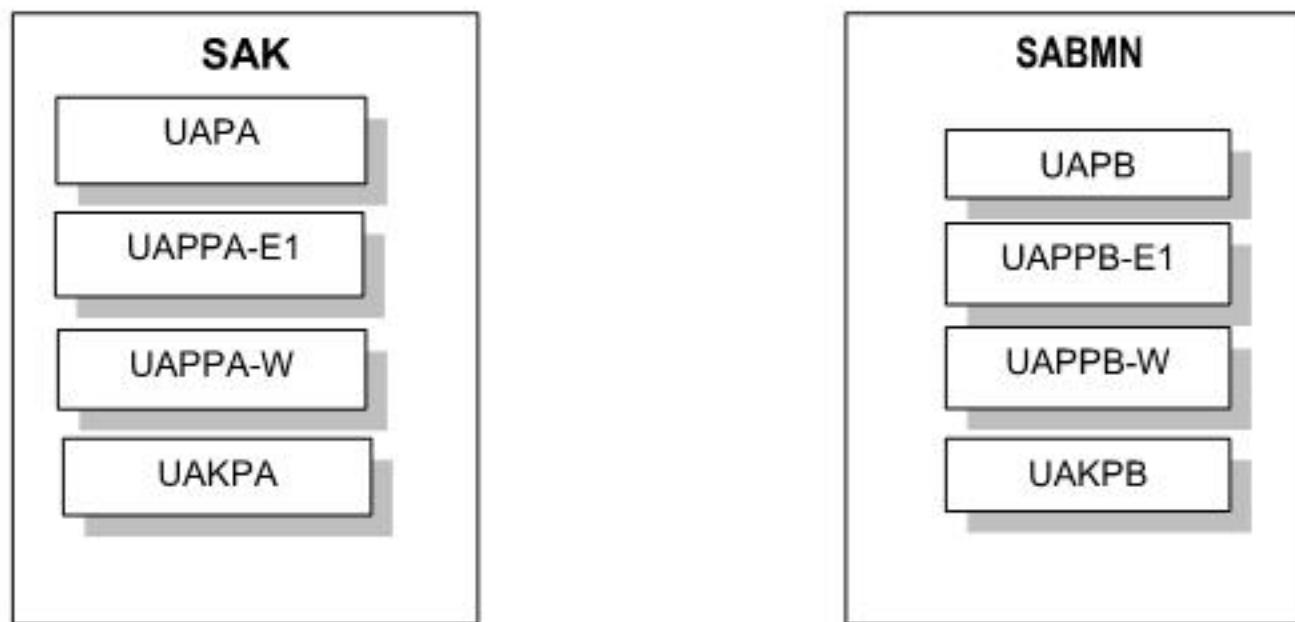
(2) Apabila...

- (2) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

B. Prosedur Akuntansi atas Barang Milik Negara

Organisasi Sistem Akuntansi Instansi

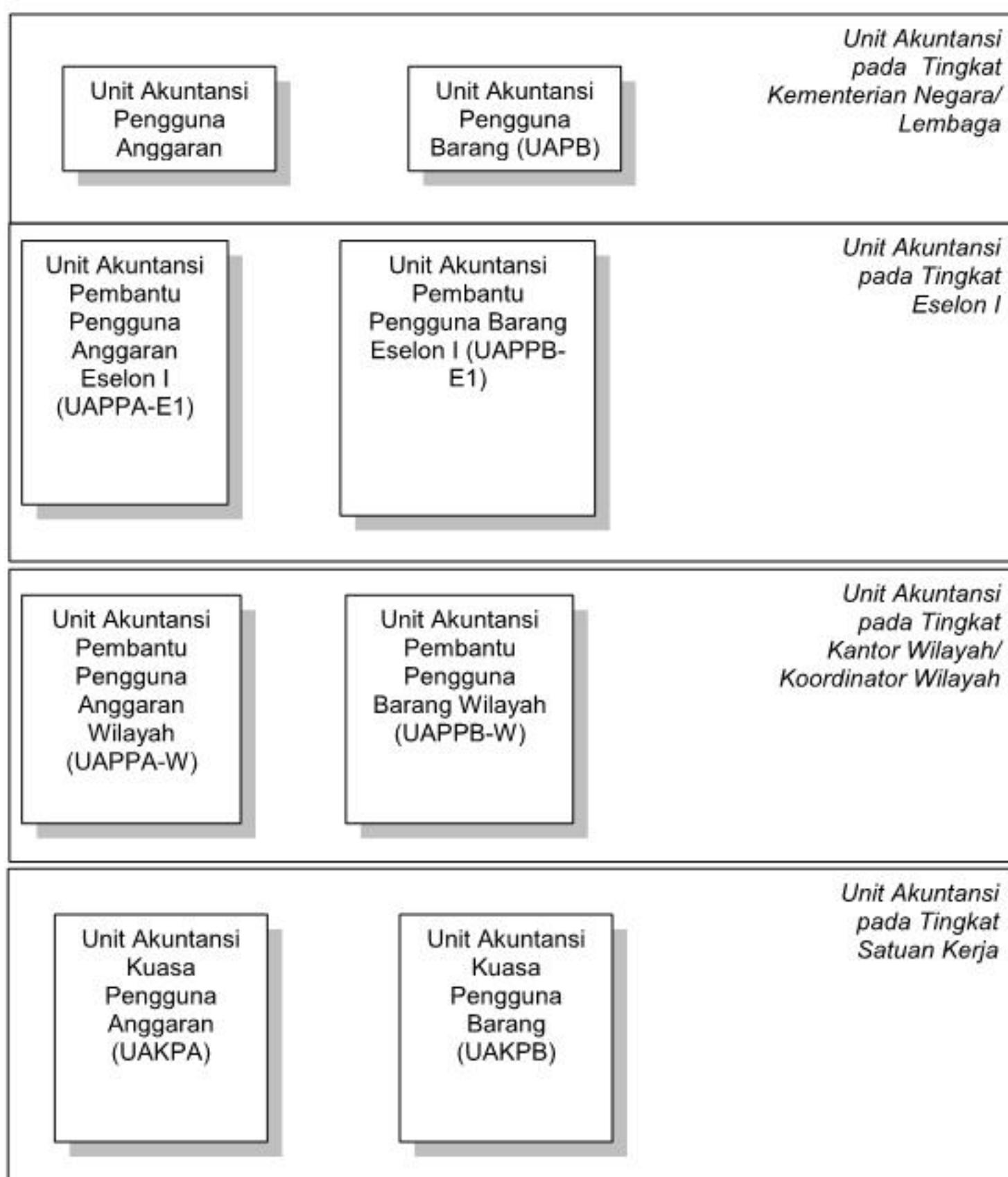
Sebagaimana dikemukakan pada Bab I, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) memiliki dua sub sistem: Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi BMN (SABMN). Secara grafis organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Organisasi Sistem Akuntansi Instansi

Bila struktur akuntansi tersebut di atas dikaitkan dengan struktur organisasi di Kementerian/Negara/Lembaga, maka organisasi akuntansinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur...



Gambar 3. Struktur Akuntansi

Organisasi Akuntansi BMN

Secara umum, struktur organisasi akuntansi Barang Milik Negara (BMN) ditetapkan sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

UAPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kementerian negara/lembaga (pengguna barang), penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

2. Unit Akuntansi...

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1)

UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat eselon I, penanggungjawabnya adalah pejabat eselon I.

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)

UAPPB-W merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai koordinator, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Untuk UAPPB-W Dekonsentrasi penanggungjawabnya adalah Gubernur sedangkan untuk UAPPB-W Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga.

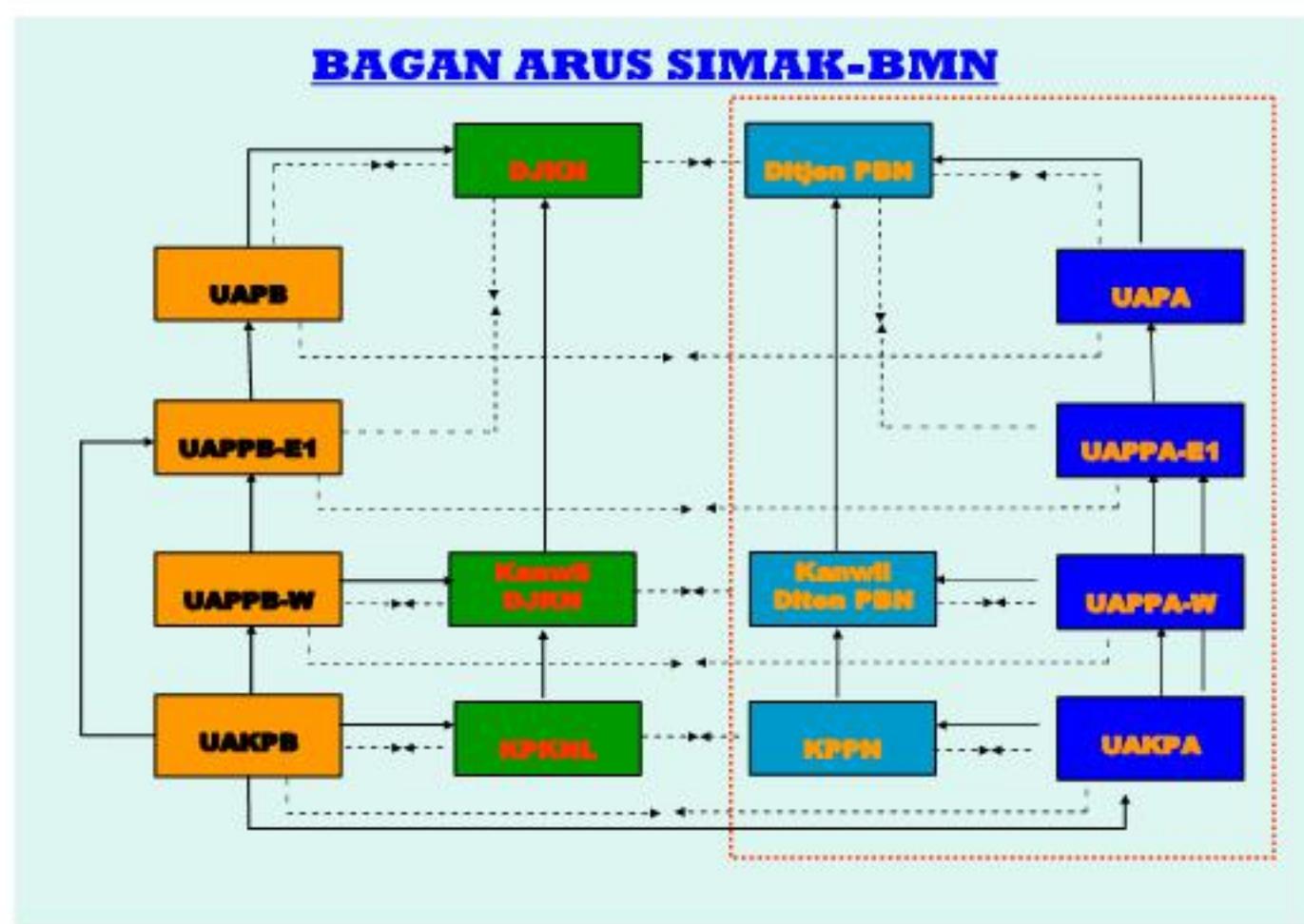
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

UAKPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat satuan kerja (kuasa pengguna barang) yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. Penanggung jawab UAKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



Gambar 4. Penanggung Jawab UAKPB

Bagan 3. Arus SIMAK-BMN...



Bagan 3. Arus SIMAK-BMN

Jenis-jenis Transaksi dalam Akuntansi BMN

Saldo Awal

Saldo Awal, merupakan saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannya SIMAK-BMN yang merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN tahun sebelumnya.

Perolehan BMN

Merupakan transaksi penambahan BMN yang tahun tanggal perolehannya sama dengan tahun anggaran berjalan. Transaksi perolehan BMN meliputi:

- *Pembelian*, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil pembelian.
- *Transfer Masuk*, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari UAKPB yang lain.
- *Hibah*, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penerimaan dari pihak ketiga.
- *Rampasan*, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.
- Penyelesaian...

- *Penyelesaian Pembangunan*, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/ gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.
- *Pembatalan Penghapusan*, merupakan pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan.
- *Reklasifikasi Masuk*, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini biasanya digunakan karena adanya perubahan peruntukan BMN atau untuk mengoreksi kesalahan kodifikasi pada pembukuan BMN sebelumnya.
- *Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak*, merupakan transaksi perolehan barang dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.

Perubahan BMN

Transaksi perubahan BMN meliputi:

- *Pengurangan Kuantitas/Nilai*, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang.
- *Pengembangan*, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari pembukuan Ekstrakomptabel ke pembukuan Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam pembukuan Intrakomptabel.
- *Perubahan Kondisi*, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.
- *Koreksi Perubahan Nilai/**Kuantitas***, merupakan koreksi pencatatan atas nilai BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya.
- *Perubahan/ Pengembangan BMN dari penyerahan Aset Tetap Hasil Renovasi*, merupakan transaksi perubahan BMN suatu UAKPB karena adanya penyerahan aset tetap hasil renovasi dari satker/ pihak lain yang telah mengembangkan BMN UAKPB tersebut.

- Penghentian BMN...

- *Penghentian BMN dari penggunaan aktif*, merupakan transaksi yang menyebabkan perubahan klasifikasi BMN dalam neraca umumnya dari aset tetap menjadi aset lainnya.

Penghapusan BMN

Transaksi penghapusan BMN meliputi:

- *Penghapusan*, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang;
- *Transfer Keluar*, merupakan transaksi penyerahan BMN ke UAKPB lain.
- *Hibah*, merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihak ketiga.
- *Reklasifikasi Keluar*, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.
- *Koreksi Pencatatan*, merupakan transaksi untuk mengoreksi/mengurangi jumlah barang pada catatan BMN karena kelebihan catat pada pelaporan BMN sebelumnya.

Prosedur Akuntansi BMN pada Tingkat UAKPB

Prosedur akuntansi BMN pada UAKPB berasal dari input yang berupa dokumen sumber. Dokumen sumber yang sahih diproses melalui entry data. Pemrosesan akan menghasilkan keluaran berupa berbagai macam buku/daftar, kartu dan laporan.

Input/Dokumen sumber

1. Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi catatan dan atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.
2. Untuk transaksi Perolehan/Pengembangan/Penghapusan, dokumen sumber yang diperlukan meliputi Berita Acara Serah Terima BMN, Bukti Kepemilikan BMN, SPM/ SP2D, Faktur pembelian, Kuitansi, Surat Keputusan Penghapusan, dan dokumen lain yang sah.

Proses SIMAK-BMN Tingkat UAKPB

1. *Proses Bulanan dan Semesteran*

- Membukukan data transaksi BMN ke dalam Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang Barang Bersejarah, Daftar Barang Persediaan dan Kartu Konstruksi Dalam Penggerjaan (manual) berdasarkan dokumen sumber.
- Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR/DR, dan DIL/DL.
- Membuat Laporan Barang pada akhir semester.
- Meminta pengesahan Penanggung jawab UAKPB atas Laporan Barang.
- Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan neraca tingkat UAKPA. Penyampaian ADK ke UAKPA untuk bulan Juni dan Desember dilengkapi pula dengan Catatan Ringkas BMN yang antara lain berisi kemungkinan masih adanya barang-barang yang bermasalah seperti tidak dapat dimasukkannya item BMN tertentu ke dalam aplikasi karena tabel barangnya belum mampu menampung nama barang tersebut—meskipun sudah didekatkan dengan nama barang lain yang sudah ada dalam tabel. Barang-barang yang belum jelas status kepemilikannya seperti penerimaan hibah yang belum ada BAST-nya, penambahan nilai aset yang mencapai jumlah melebihi nilai kapitalisasi atas BMN pihak lain juga harus diungkapkan. Catatan ini akan melengkapi Catatan atas Laporan Keuangan pada UAKPA.
- Menyampaikan Laporan Barang Persediaan dan Laporan Konstruksi Dalam Penggerjaan kepada UAKPA untuk dibukukan pada akhir semester.
- Menyampaikan Laporan BMN, ADK dan Catatan Ringkas BMN ke UAPPB-W/UAPPB-E1, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya suatu semester.

• Untuk UAKPB...

- Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selain mengirimkan Laporan BMN dan Catatan Ringkas BMN beserta ADK ke UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga wajib mengirimkan Laporan BMN, ADK dan Catatan Ringkas BMN ke UAPPB-E1 pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
- Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.

2. **Proses Akhir Periode Akuntansi**

- Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan masing-masing.
- Mencatat perubahan kondisi barang yang telah disahkan oleh Penanggungjawab Ruangan ke dalam SIMAK-BMN.
- Membuat Laporan Kondisi Barang .
- Meminta pengesahan Penanggungjawab UAKPB atas LKB.
- Membuat Laporan Barang Tahunan berdasarkan saldo Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, dan Daftar Barang Barang Bersejarah.
- Meminta persetujuan Penanggungjawab UAKPB atas Laporan Barang.
- Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB beserta ADK ke UAPPB-W atau ke UAPPB-E1 untuk UAKPB Pusat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. *Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selain mengirimkan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga wajib mengirimkan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-E1 pada kementerian negara/lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.*
- Mengarsipkan Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang Barang Bersejarah, salinan LKB, dan salinan Laporan Barang secara tertib.
- Melakukan proses back up data dan tutup tahun.

Keluaran SIMAK-BMN Tingkat KPB

Keluaran/laporan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN tingkat UAKPB antara lain meliputi:

- a. Daftar Barang Intrakomptabel
- b. Daftar Barang Ekstrakomptabel
- c. Daftar Barang Barang Bersejarah
- d. Laporan Persediaan
- e. Laporan Konstruksi Dalam Penggerjaan
- f. Kartu Inventaris/ Identitas Barang (KIB) Tanah
- g. Kartu Inventaris/ Identitas Barang (KIB) Bangunan Gedung
- h. Kartu Inventaris/ Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor
- i. Kartu Inventaris/ Identitas Barang (KIB) Alat Persenjataan
- j. Daftar Inventaris/ Barang Lainnya (DIL/DL)
- k. Daftar Inventaris/ Barang Ruangan (DIR/DR)
- l. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
- m. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
- n. Laporan Kondisi Barang (LKB)

BAB VIII

AKUNTANSI BIAYA

Sistem akuntansi mencatat kejadian serta transaksi ekonomi, seperti penjualan, pembelian bahan, dan memproses data dalam transaksi tersebut menjadi informasi yang berguna bagi manajer, tenaga penjual, penyelia produksi, dan pihak lainnya. Pemrosesan setiap transaksi ekonomi meliputi pengumpulan (*collecting*), pengkategorian (*categorizing*), peringkasan (*summarizing*), dan penganalisisan (*analyzing*). Sistem akuntansi menyajikan informasi yang ditemukan dalam laporan laba –rugi, neraca, serta laporan arus kas dan dalam laporan kinerja, seperti biaya operasi suatu pabrik atau biaya pemberian jasa.

Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan mempunyai tujuan yang berbeda. **Akuntansi manajemen** mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan nonkeuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Manajer akan menggunakan informasi akuntansi manajemen itu untuk memilih, mengomunikasikan, dan mengimplementasikan strategi, serta untuk mengoordinasikan keputusan-keputusan desain produk, produksi, dan pemasaran. Akuntansi manajemen berfokus pada pelaporan internal.

Akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok. Akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (*Generally Accepted Accounting Principles-GAAP*).

Akuntansi biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. **Akuntansi biaya** mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan nonkeuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya modern memiliki perspektif bahwa mengumpulkan informasi tentang biaya merupakan fungsi keputusan manajemen yang sedang dibuat.

Kunci keberhasilan perusahaan adalah menciptakan nilai bagi pelanggan dengan membedakan produknya dari produk pesaing. **Strategi** (*strategy*) menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang yang terbuka di pasar untuk mencapai tujuannya.

1. Biaya dan Terminologi Biaya

Definisi dari biaya (*cost*) adalah sumber daya yang dikorbankan (*sacrified*) atau dilepaskan (*forgone*) untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. **Biaya aktual (*actual costs*)** adalah biaya yang terjadi (biaya historis atau masa lalu), yang dibedakan dari **biaya yang dianggarkan (*budgeted cost*)**, yang merupakan biaya yang diprediksi atau diramalkan (biaya masa depan).

Obyek biaya...

Obyek biaya (cost object) biasanya digunakan untuk memandu keputusan yang akan dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang biayanya ingin diukur.

Sistem kalkulasi biaya secara tipikal akan menghitung biaya dalam dua tahap dasar: akumulasi (*accumulation*) yang dilanjutkan dengan pembebanan (*assignment*). **Akumulasi biaya** (*cost accumulation*) adalah kumpulan data biaya yang diorganisir dalam beberapa cara dengan menggunakan sarana berupa sistem akuntansi. **Pembebanan biaya** (*cost assignment*) adalah istilah umum yang meliputi (1) menelusuri akumulasi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan obyek biaya dan (2) mengalokasikan akumulasi biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan obyek biaya.

2. Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung

a. Pengertian

- **Biaya langsung dari obyek biaya** berkaitan dengan obyek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi (efektif-biaya). Istilah **penelusuran biaya (cost tracing)** digunakan untuk menggambarkan pembebanan biaya langsung ke obyek biaya tertentu.
- **Biaya tidak langsung dari obyek biaya** berkaitan dengan obyek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke obyek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomis (efektif-biaya). Istilah **alokasi biaya (cost allocation)** digunakan untuk menggambarkan pembebanan biaya tidak langsung ke obyek biaya tertentu.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Klasifikasi Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Beberapa faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya sebagai langsung atau tidak langsung:

- **Materialitas suatu biaya**, yaitu semakin tidak material suatu biaya semakin kecil kemungkinan biaya tersebut dapat ditelusuri secara ekonomis ke obyek biaya tertentu.
- Ketersediaan...

- **Ketersediaan teknologi pengumpulan informasi.** Perkembangan teknologi pengumpulan informasi memungkinkan perusahaan mengelompokkan banyak biaya sebagai biaya langsung.
- **Desain operasi.** Mengklasifikasikan biaya sebagai biaya langsung akan mudah jika fasilitas perusahaan (atau sebagian daripadanya) digunakan secara eksklusif untuk obyek biaya spesifik, seperti produk tertentu atau pelanggan tertentu.

3. Pola Perilaku Biaya: Biaya Variabel dan Biaya Tetap.

Sistem klasifikasi biaya (*costing system*) mencatat biaya sumber daya yang diperoleh seperti bahan, tenaga kerja, dan peralatan, serta menelusuri bagaimana sumber daya tersebut digunakan untuk menghasilkan dan menjual produk atau jasa. Dengan mencatat biaya sumber daya yang diperoleh dan digunakan akan memungkinkan manajer melihat bagaimana biaya diperlakukan.

- **Biaya Variabel** (*variable cost*) secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait.
- **Biaya tetap** (*fixed cost*) tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume tertentu.

Biaya didefinisikan sebagai tetap atau variabel jika dikaitkan dengan suatu *aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu*. Suatu pos biaya mungkin merupakan biaya variable pada suatu tingkat aktivitas dan menjadi biaya tetap pada tingkat aktivitas yang lain. Beberapa biaya ada yang mempunyai unsur tetap maupun variabel dan disebut sebagai biaya *campuran* atau *semivariabel*.

4. Biaya Per Unit

Secara umum, pembuat keputusan harus mempertimbangkan biaya total dan bukan biaya per unit. Namun, pada banyak konteks pengambilan keputusan, perhitungan biaya per unit menjadi sangat penting. Sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah biaya total maupun jumlah biaya rata-rata.

Biaya per unit...

Biaya per unit, yang juga disebut **biaya rata-rata**, dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit. Unit di sini dapat digambarkan dengan berbagai cara.

Biaya per unit dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Biaya per unit} = \frac{\text{Biaya total}}{\text{Jumlah unit produksi}}$$

5. Laporan Keuangan, Biaya Persediaan, dan Biaya Periode

Membedakan antara biaya persediaan (*inventoriable cost*) dan biaya periode (*period cost*) diperlukan untuk tujuan pelaporan keuangan.

a. Pengertian

- **Biaya Persediaan (*inventoriable costs*)** adalah semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual.
- **Biaya Periode (*period costs*)** adalah semua biaya yang dicantumkan pada laporan laba-rugi selain harga pokok penjualan. Biaya periode diperlakukan sebagai beban periode akuntansi ketika biaya ini terjadi karena diharapkan memberi manfaat pada periode berjalan dan diperkirakan tidak akan memberi manfaat lagi pada periode berikutnya. Membebankan jenis biaya ini pada periode terjadinya berarti manandingkan biaya terhadap pendapatan.

b. Jenis-jenis Persediaan

- 1) **Persediaan bahan langsung (*direct materials inventory*)**.
Bahan langsung adalah persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi.
- 2) **Persediaan barang dalam proses (*work in process inventory*)**.
Barang-barang yang baru sebagian dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai. Persediaan jenis ini kadang disebut **persediaan sedang dikerjakan (*work in progress*)**.
- 3) **Persediaan barang jadi (*finished goods inventory*)**. Barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum terjual.

6. Perhitungan Biaya Pokok Produksi

a. Pengertian Biaya Produksi

Biaya produksi adalah merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap jual.

Contoh: biaya depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi.

b. Pengertian Harga Pokok

Pengertian Harga Pokok menurut beberapa ahli diantaranya adalah :

- Harga pokok adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.
- Harga pokok adalah sebagai bagian dari harga perolehan suatu aktiva yang ditunda pembebannya dimasa yang akan datang.

c. Pengertian Harga Pokok Produksi

Harga Pokok Produksi adalah merupakan penjumlahan dari tiga unsur biaya produksi yaitu: bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik.

d. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi

Informasi biaya sangat bermanfaat untuk menentukan harga pokok produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada dua metode pendekatan didalam menentukan harga pokok produksi, yaitu :

- Full Costing

Metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produksi yaitu :

Full Costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga pokok produksi, yang terdiri dari : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun tetap.

**Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Pendekatan
metode Full Costing**

Biaya Bahan Baku	XXX
Biaya Tenaga Kerja Langsung	XXX
Biaya Overhead Pabrik Variabel	XXX
Biaya Overhead Pabrik Tetap	<u>XXX+</u>
Harga Pokok Produksi	XXX
Biaya Administrasi dan Umum	XXX
Biaya Pemasaran	<u>XXX +</u>
Harga Pokok Produk	XXX

▪ **Variabel Costing**

Metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel kedalam harga pokok produksi atau secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai berikut :

Variabel costing adalah penentuan harga pokok yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.

**Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Pendekatan
Metode Variabel Costing**

Biaya Bahan Baku	XXX
Biaya Tenaga Kerja Langsung	XXX
Biaya Overhead Pabrik Variabel	<u>XXX +</u>
Harga Pokok Produksi	XXX
Biaya Variabel	XXX
Biaya Administrasi dan Umum	XXX
Biaya Pemasaran Variabel	XXX
Biaya Tetap	XXX
Biaya Administrasi dan Umum Tetap	XXX
Biaya Pemasaran Tetap	<u>XXX +</u>
Harga Pokok Produk	XXX

e. Metode Pengumpulan Biaya Produksi

Pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh sifat dari pengolahan produk. Pengolahan produk dapat dilakukan atas dasar pesanan dari langganan atau proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Oleh karena itu pengelompokan biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu :

▪ **Metode Harga Pokok Pesanan**

Pada metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan. Metode ini dianggap tepat untuk perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk yang masing-masing bersifat khas, seperti misalnya perusahaan percetakan.

Pada metode harga pokok pesanan ini, harga pokok pesanan harus ditentukan segera pada saat suatu pesanan telah diselesaikan dari produksinya.

▪ **Metode Harga Pokok Proses**

Pada metode harga pokok proses biaya produksi dikumpulkan berdasarkan atas departemen atau pusat-pusat yang dibentuk yang dibentuk sesuai dengan tahap-tahap pengolahan produksinya. System ini dianggap tepat untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang sama dan proses produksinya berjalan secara kontinyu, seperti pabrik makanan atau pabrik mainan.

f. Metode Penentuan Harga Jual

Metode penentuan harga jual ada empat, yaitu :

▪ **Penentuan Harga Normal (Normal Pricing)**

Dalam keadaan normal, harga jual ditentukan atas biaya penuh masa yang akan datang dan ditambahkan atas laba yang diharapkan. Penentuan harga jual normal biasa disebut dengan Cost-Plus Pricing, taksiran biaya penuh dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu Full costing dan Variabel Costing.

Full Costing...

Full Costing :

$$\% \text{ Mark Up} = \frac{\text{Laba yang diharapkan} + \text{Biaya non produksi}}{\text{biaya produksi}}$$

$$\text{Harga jual Per - unit} = \frac{\text{Total harga jual}}{\text{Jumlah produk yang produksi}}$$

Menghitung harga jual / unit produk dengan pendekatan Full Costing sebagai berikut

HPP Penuh	XXX
Biaya Bahan Baku	XXX
Biaya Tenaga Kerja Langsung	XXX
Biaya Overhead Pabrik Variabel	XXX
Biaya Oveerhead Pabrik Tetap	<u>XXX</u> +
Total Biaya	XXX
Biaya non Produksi	<u>XXX</u> +
Total Biaya Penuh	XXX
Mark Up Y% x Total Aktiva	XXX
Total Harga Jual	XXX
Volume Produk	<u>XXX</u> :
Harga Jual Per-Unit	XXX

Variabel Costing :

$$\% \text{ Mark Up} = \frac{\text{Laba yang diharapkan} + \text{Biaya tetap}}{\text{biaya variabel}}$$

Menghitung harga jual / unit produk dengan pendekatan Variabel Costing sebagai berikut

HPP Penuh	XXX
Biaya Bahan Baku	XXX
Biaya Tenaga Kerja Langsung	XXX
Biaya Overhead Pabrik Variabel	XXX
Total Biaya Variabel	XXX
Mark Up Y% x Biaya Variabel	XXX
Total Harga Jual	XXX
Volume Produksi	<u>XXX</u> :
Harga Jual Per-Unit	XXX

- Cost Type...

- Cost Type Contract (Cost type Contract)

Kontrak pembuatan produk / jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk / jasa pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut.

- Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus (Spesial Order Pricing)

Pesanan diterima oleh perusahaan diluar pesanan reguler perusahaan. Pesanan regular adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam tahun anggaran. Pesanan khusus adalah diperkirakan tidak hanya mengeluarkan biaya variabel saja, namun merupakan biaya tetap, karena harus beroperasi diatas kapasitas yang telah tersedia.

- Penentuan Harga Jual Waktu dan Bahan

Penentuan harga jual dan bahan ini pada dasarnya merupakan Cost-Plus Pricing. Harga jual ditentukan sebesar harga jual perbuah dan ditambah laba yang diharapkan. Metode harga jual seperti ini digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, dok kapal, dan perusahaan lain yang menjual jasa reparasi dan bahan, dan suku cadang sebagai pelengkap penjualan jasa.

7. Analisis...

7. Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output

Unit Kerja :			Tahun: 2010
Program :			
Kegiatan :			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Masukan			
Keluaran			
Anggaran Belanja			
Jenis Belanja	Rincian Biaya		Jumlah Anggaran
	Satuan	Harga	(Rp)
I. Biaya Langsung:			
A. Biaya Variable			
1. Biaya ...			
2. Biaya ...			
3. Biaya ...			
Jumlah Biaya Variable			
B. Biaya Tetap			
1. Biaya ...			
2. Biaya ...			
3. Biaya ...			
Jumlah Biaya Tetap			
Jumlah Biaya Langsung			
II. Biaya Tidak langsung			
A. Biaya Variable			
1. Biaya ...			
2. Biaya ...			
3. Biaya ...			
Jumlah Biaya Variable			
B. Biaya Tetap			
1. Biaya ...			
2. Biaya ...			
3. Biaya ...			
Jumlah Biaya Tetap			
Jumlah Biaya Tidak Langsung			
Jumlah Biaya			
Biaya Per Unit Output			

BAB IX

INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

1. RASIO KEUANGAN

Aspek keuangan yang dipergunakan untuk penilaian kinerja keuangan meliputi 7 (tujuh) indikator dengan total skor 100 dan merupakan bagian yang melengkapi laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut :

No.	INDIKATOR	NILAI/BOBOT
1	Imbalan investasi (Return on Investment)	15
2	Rasio kas (Cash Ratio)	15
3	Rasio Lancar (Current Ratio)	15
4	Collection Period (CP)	15
5	Perputaran Persediaan (PP)	10
6	Perputaran Total Aset (TATO)	10
7	Rasio Aset Bersih Terhadap Total Aset	20
TOTAL		100

Persamaan yang digunakan untuk menghitung indikator :

1. Imbalan Investasi (Return on Investment)

Rumus:

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{Capital Employed} \times 100\%$$

Definisi :

- EBIT adalah kenaikan aset bersih sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari Aset Tetap, Aset lain- lain, Aset non Produktif
- Penyusutan adalah Depresiasi dan Amortisasi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku. Total Aset dikurangi Aset tetap dalam penyelesaian (pelaksanaan).

Daftar skor...

Daftar skor penilaian ROI

ROI	BOBOT
18 < ROI	15,0
15 < ROI ≤ 18	13,5
13 < ROI ≤ 15	12,0
12 < ROI ≤ 13	10,0
10,5 < ROI ≤ 12	9,0
9 < ROI ≤ 10,5	7,5
7 < ROI ≤ 9	6,0
5 < ROI ≤ 7	5,0
3 < ROI ≤ 5	4,0
1 < ROI ≤ 3	3,0
0 < ROI ≤ 1	2,0
ROI ≤ 0	1,0

Contoh perhitungan :

Pusfatekgan memiliki ROI 14 % maka sesuai tabel skor untuk indikator ROI adalah 12,0.

2. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rumus :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Kas, Bank, dan Surat Berharga Jangka Pendek (investasi lancar) adalah posisi masing-masing pada akhir tahun
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Daftar skor penilaian Cash Ratio

CASH RATIO=X%	BOBOT
X > 35	15,0
25 ≤ X ≤ 35	12,0
15 ≤ X ≤ 25	9,0
10 ≤ X ≤ 15	6,0
5 ≤ X ≤ 10	3,0
0 ≤ X ≤ 5	0

Contoh...

Contoh perhitungan :

Pusfatekgan memiliki Cash Ratio sebesar 32% maka menurut tabel skor untuk indikator Cash Ratio adalah 12,0.

3. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Current Assets adalah posisi Total Aset Lancar pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.
-

Daftar skor penilaian Current Ratio

CURRENT RATIO=X%	BOBOT
$125 \geq X$	15,0
$110 \leq X \leq 125$	12,0
$100 \leq X \leq 110$	9,0
$95 \leq X \leq 100$	6,0
$90 \leq X \leq 95$	3,0
$X \leq 90$	0

Contoh perhitungan :

Pusfatekgan memiliki Current Ratio sebesar 115% maka menurut table skor untuk indikator Current Ratio adalah 12,0.

4. Collection Period (CP)

Rumus:

$$\text{Collection Period} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha (Piutang Pelayanan) setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang (Penyisihan Kerugian Piutang) pada akhir tahun buku
- Total pendapatan...

- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku yang meliputi seluruh pendapatan operasional sebelum dikurangi dengan Pengurang Pendapatan Operasional.

Daftar skor penilaian Collection Period :

ROI	PERBAIKAN = X (hari)	BOBOT
$X \leq 60$	> 35	15,0
$60 < X \leq 90$	$30 < X \leq 35$	13,5
$90 < X \leq 120$	$25 < X \leq 30$	12,0
$120 < X \leq 150$	$20 < X \leq 25$	10,5
$150 < X \leq 180$	$15 < X \leq 20$	9,0
$180 < X \leq 210$	$10 < X \leq 15$	7,2
$210 < X \leq 240$	$6 < X \leq 10$	5,4
$240 < X \leq 270$	$3 < X \leq 6$	3,6
$270 < X \leq 300$	$1 < X \leq 3$	1,6
$300 < X$	$0 < X \leq 1$	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dan kedua skor menurut tabel diatas

Contoh perhitungan :

- a. Pusfatekgan pada tahun 2010 memiliki Collection Period 120 hari dan pada tahun 2009 sebesar 127 hari. Sesuai dengan tabel diatas maka skor tahun 2010 menurut :

- Tingkat collection period : 12,0
- Perbaikan collection period (7 hari) : 5,4

Dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 12,0

- b. Pusfatekgan pada tahun 2010 memiliki Collection Period 240 hari dan pada tahun 2009 sebesar 272 hari. Sesuai dengan tabel diatas maka skor tahun 2010 menurut :

- Tingkat collection period : 5,4
- Perbaikan collection period (32 hari) : 13,5

Dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 13,5

5. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang tersedia untuk dijual, dan digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan peralatan dan suku cadang dan persediaan pendukung kegiatan lainnya.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku yang bersangkutan meliputi seluruh pendapatan operasional sebelum dikurangi dengan Pengurang Pendapatan Operasional.

Daftar skor penilaian Perputaran Persediaan:

ROI	PERBAIKAN = X (hari)	BOBOT
$x \leq 60$	$X > 35$	10,0
$60 < X \leq 90$	$30 < X \leq 35$	9,0
$90 < X \leq 120$	$25 < X \leq 30$	8,0
$120 < X \leq 150$	$20 < X \leq 25$	7,0
$150 < X \leq 180$	$15 < X \leq 20$	6,0
$180 < X \leq 210$	$10 < X \leq 15$	4,6
$210 < X \leq 240$	$6 < X \leq 10$	3,6
$240 < X \leq 270$	$3 < X \leq 6$	2,4
$270 < X \leq 300$	$1 < X \leq 3$	1,2
$300 < X$	$0 < X \leq 1$	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dan kedua skor menurut tabel diatas

Contoh perhitungan :

- a. Pusfatekgan pada tahun 2010 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 2009 sebesar 195 hari.

Sesuai dengan tabel diatas maka skor tahun 2010 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 6,0
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 4,6

Dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 6,0

b. Pusfatekgan...

- b. Pusfatekgan pada tahun 2010 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 2009 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel di atas maka skor tahun 2010 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3,6
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 9,0

Dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 9,0

6. Perputaran Total Asset (TATO)

Rumus :

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah total pendapatan usaha yang meliputi seluruh pendapatan operasional setelah dikurangi pengurang pendapatan operasional ditambah penghasilan non operasional tetapi tidak termasuk penelapan hasil penjualan aset tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aset dikurangi dengan Aset tetap dalam pelaksanaan.

Daftar skor penilaian Perputaran Total Asset:

ROI	PERBAIKAN = X (hari)	BOBOT
$120 < X$	$20 < X$	10,0
$105 < X \leq 120$	$15 < X \leq 20$	9,0
$90 < X \leq 105$	$10 < X \leq 15$	8,0
$75 < X \leq 90$	$5 < X \leq 10$	7,0
$60 < X \leq 75$	$0 < X \leq 5$	6,0
$40 < X \leq 60$	$X \leq 0$	5,0
$20 < X \leq 40$	$X \leq 0$	4,0
$X \leq 20$	$X \leq 0$	3,0

Skor yang di gunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel diatas.

Contoh...

Contoh perhitungan :

- a. Pusfatekgan pada tahun 2010 memiliki Perputaran Total Asset 70% dan pada tahun 2009 sebesar 60%.

Sesuai dengan tabel diatas maka skor tahun 2010 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 6,0
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 7,0

Dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 7,0

- b. Pusfatekgan pada tahun 2010 memiliki Perputaran Total Asset 108 % dan pada tahun 2009 sebesar 98 %.

Sesuai dengan tabel diatas maka skor tahun 2010 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 9,0
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 7,0

Dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 9,0

7. Rasio Total Aset Bersih terhadap Total Aset (TAB terhadap TA)

Rumus :

$$TAB \text{ terhadap } TA = \frac{\text{Total Aktiva Bersih}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Aset Bersih adalah seluruh komponen Aset Bersih pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset untuk rasio ini adalah Total Asset dikurangi dengan asset yang berasal dari dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Daftar skor penilaian Ratio Aset Bersih terhadap Total Asset :

Tab Terhadap TA (%)=X	BOBOT	Tab Terhadap TA (%)=X	BOBOT
$X < 0$	0,0	$50 \leq X < 60$	17,0
$0 \leq X < 10$	8,0	$60 \leq X < 70$	16,0
$10 \leq X < 20$	12,0	$70 \leq X < 80$	15,0
$20 \leq X < 30$	14,5	$80 \leq X < 90$	14,0
$30 \leq X < 40$	20,0	$90 \leq X < 100$	13,0
$40 \leq X < 50$	18,0		

Contoh...

Contoh perhitungan:

Pusfatekgan pada memiliki Rasio Aset Bersih terhadap Total Asset 35%, maka sesuai dengan tabel diatas maka skor untuk indikator rasio Aset Bersih terhadap Total Aset adalah 20,0

Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Pusfatekgan

Tingkat kinerja kesehatan keuangan digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil masing-masing rasio keuangan tersebut di atas :

1. SEHAT, yang terdiri dari :

AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95
AA apabila $80 < TS \leq 95$
A apabila $65 < TS \leq 80$

2. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

BBB apabila $50 < TS \leq 65$
BB apabila $40 < TS \leq 50$
B apabila $30 < TS \leq 40$

3. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:

CCC apabila $20 < TS \leq 30$
CC apabila $10 < TS \leq 20$
C apabila $0 < TS \leq 10$

2. BAGAN AKUN STANDAR

Kode Akun	Uraian Akun
11000	Aset
11100	Aset Lancar
11110	Kas dan Setara Kas
11111	Kas Kecil
11112	Kas di Bendahara Pengeluaran
11113	Kas di Bank
11114	Deposito
11120	Uang Muka

Kode Akun	Uraian Akun
11130	Piutang Usaha
11131	Piutang Usaha Pelayanan BLU
11140	Piutang Lain-lain
11141	Piutang Bunga Deposito
11150	Biaya Dibayar Dimuka
11160	Persediaan
11200	Investasi
11201	Investasi Jangka Pendek
11202	Investasi Jangka Panjang
11300	Aset Tetap
11310	Tanah
11320	Peralatan dan Mesin
11321	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
11330	Gedung dan Bangunan
11331	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
11340	Jalan dan Irigasi
11400	Aset Lainnya
11410	Aset Tak Berwujud
11411	Amortisasi
11500	Konstruksi dalam Pengerjaan
21000	Kewajiban
21100	Kewajiban Jangka Pendek
21110	Utang Kepada Pihak Ke-3
21120	Utang Pajak
21130	Pendapatan Diterima Di Muka
21140	Utang Uang Muka KPPN
21200	Kewajiban Jangka Panjang

Kode Akun	Uraian Akun
31000	Ekuitas
31100	Modal Awal
31200	Modal Hibah (Transfer BMN)
31300	Modal Donasi
31400	Surplus Tahun Lalu
31500	Surplus Tahun Berjalan
41000	Pendapatan Usaha
41100	Pendapatan Operasional Dari Jasa Layanan
41110	Pendapatan Penjualan Data
41111	ALOS
41112	SPOT
41113	WorldView/Quick bird
41119	Retur Penjualan Data
41120	Pendapatan Bimtek Pengolahan Data
41130	Pendapatan Penjualan Instrumen Kedirgantaraan
41131	Sistem Pemantauan Aliran Air Sungai (SPAS)
41140	Pendapatan dari Info Data Spasial
41200	Pendapatan Operasional Dari Non Jasa Layanan
41210	Pendapatan APBN BA 82
41211	Pendapatan APBN Operasional
41212	Pendapatan APBN Investasi
41300	Pendapatan Hibah
41400	Pendapatan Kerjasama
61100	Beban Layanan
61110	Beban Jasa Pelayanan
61120	Beban Pembelian Data

Kode Akun	Uraian Akun
61200	Beban Administrasi dan Umum
61210	Beban Perjalanan Dinas
61211	Beban Pemeliharaan Kendaraan
61212	Beban Pemeliharaan AC
61213	Beban Penyusutan Aktiva Tetap
61214	Beban Amortisasi
61215	Beban Operasional Kendaraan Dinas
61216	Beban ATK dan Persediaan
61217	Beban Keperluan Harian Kantor
61218	Beban Rapat
61219	Beban Sewa
61220	Beban Jasa Profesi
61221	Beban Pajak
61222	Beban Komunikasi
71000	Pendapatan Non Usaha
71100	Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro
71200	Pendapatan Lain-lain
81000	Beban Non Usaha
81100	Beban Administrasi Giro Bank
81200	Beban Transfer
81300	Beban Pajak Bunga
81400	Beban Lain-lain



BAMBANG S. TEJASUKMANA